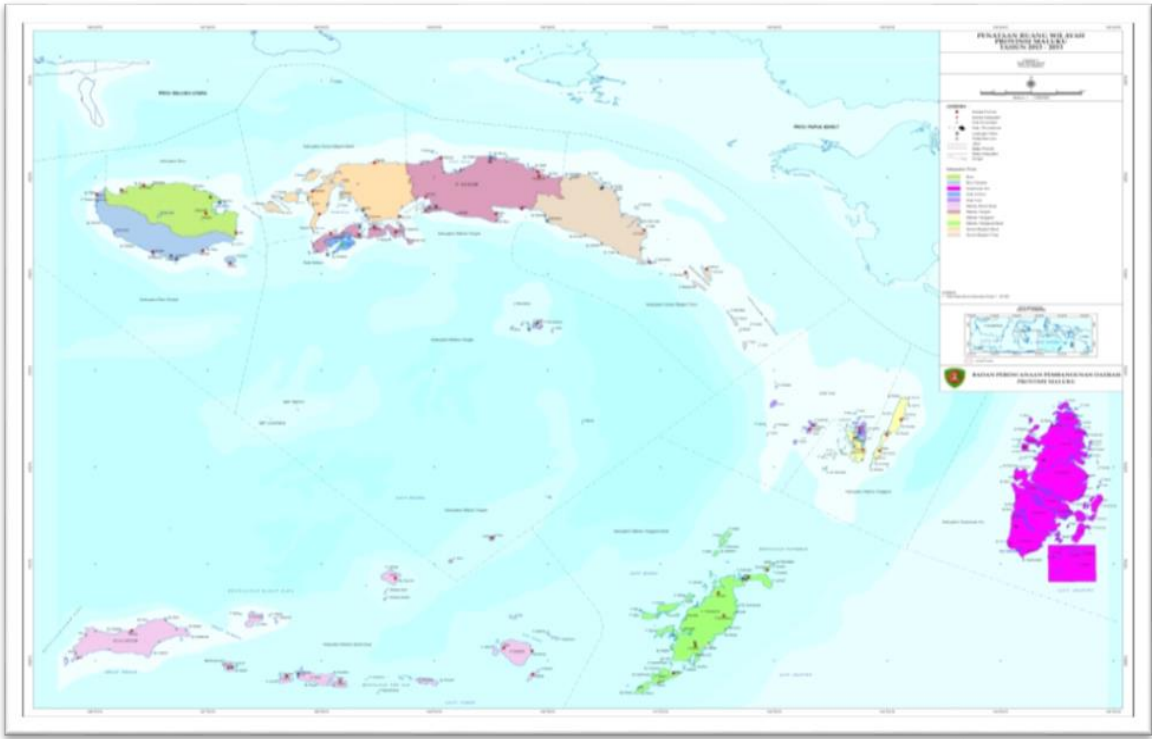


EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi

Provinsi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan memiliki luas sebesar 712.479,69 Km², dimana sebahagian besar wilayahnya merupakan perairan dengan luas 658.331,52 Km², sementara luas daratannya hanya sebesar 54.158 Km². Dengan karetretrisik yang dimiliki tentunya membuat provinsi Maluku memiliki banyak pulau yakni sebanyak 1.340 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai 11.000 Km.



Gambar. 2.1. Peta Administrasi Provinsi Maluku

Sejak ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota. Nama kabupaten/kota, luas wilayah administratif, serta jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota diperlihatkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2014

No	Kabupaten / Kota	Jumlah		
		Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kabupaten Maluku Tengah	18	165	6
2	Kabupaten Maluku Tenggara	11	189	2
3	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	78	1
4	Kabupaten Buru	10	82	-
5	Kabupaten Seram Bagian Timur	15	160	-
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	-
7	Kepulauan Aru	10	117	2
8	Kabupaten Maluku Barat Daya	17	117	-
9	Kabupaten Buru Selatan	6	79	-
10	Kota Ambon	5	30	20
11	Kota Tual	5	26	3
MALUKU		118	1135	34

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Maluku 2015

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Daerah Maluku sebagai wilayah kepulauan, salah satu pendekatan dalam implementasi pembangunan adalah pendekatan wilayah yang didasarkan pada konsep Gugus Pulau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, terdapat 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku, yaitu:

1. Gugus Pulau I meliputi wilayah Pulau Buru;
2. Gugus Pulau II meliputi Wilayah Seram Barat;
3. Gugus Pulau III meliputi Wilayah Seram Utara;
4. Gugus Pulau IV meliputi Wilayah Seram Timur;
5. Gugus Pulau V meliputi Wilayah Seram Selatan;
6. Gugus Pulau VI meliputi Wilayah Kepulauan Banda, P.Teon, P.Nila dan P.Serua;
7. Gugus Pulau VII meliputi Wilayah Pulau Ambon dan PP. Lease;
8. Gugus Pulau VIII meliputi Wilayah Kepulauan Kei;
9. Gugus Pulau IX meliputi Wilayah Kepulauan Aru;
10. Gugus Pulau X meliputi Wilayah Kepulauan Tanimbar;
11. Gugus Pulau XI meliputi Wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa, Lakor dan Damer;
12. Gugus Pulau XII meliputi Wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan Pulau Wetar.

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terletak di antara 2°30'-9° Lintang Selatan dan 124°-136° Bujur Timur, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut Seram
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Lautan Indonesia dan Laut Arafura
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Pulau Papua
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laut Sulawesi.

Kondisi geografis Provinsi Maluku, keseluruhan wilayah adalah wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil. Pulau terbesar adalah Pulau Seram (18.625 Km²), Pulau Buru (9.000 Km²), Pulau Yamdena (5.085 Km²) dan Pulau Wetar (3.624 Km²).

Terdapat 4 (empat) gunung di Provinsi Maluku dimana gunung tertinggi adalah Gunung Binaya dengan ketinggian 3.055 meter di atas permukaan laut. Gunung tersebut berada di Pulau Seram. Gunung tertinggi kedua adalah Gunung Kapala Madan yang berada di Pulau Buru, Kabupaten Buru dengan ketinggian 2.429 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah Gunung Salahutu yang berada di Pulau Ambon dengan ketinggian 1.036 meter di atas permukaan laut.

2.1.3. Topografi Kepulauan Maluku

Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah kabupaten/kota dengan topografi dataran rendah yakni Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Buru serta Buru Selatan. Pada Tabel 1.3 dapat dilihat rincian luas wilayah dataran pada masing-masing kabupaten.

Tabel 2.2. Kondisi Dataran Rendah Di Provinsi Maluku 2012

No	Kabupaten/Kota	Dataran Rendah	Luas (Ha)	Lokasi
1	Maluku Tenggara Barat	Tanimbar	1.100	Pulau Tanimbar
2	Kepulauan Aru	Dataran Aru	1.200	Kepulauan Aru
3	Seram Bagian Timur	Masiwang	5.000	Pulau Seram
4	Maluku Tengah	Seran Selatan Pasahari	4.000 40.000	Pulau Seram Pulau Seram
5	Seram Bagian Barat	Dataran Kawa Eti Kairatu	10.000 600 1.300	Pulau Seram Pulau Seram Pulau Seram
6	Buru dan Buru Selatan	Waeapo Wai Kating Wai Kumu Wai Mala Rana Samalagi Wai Lo	14.000 1.500 1.250 1.250 1.250 1.000 500	Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru
Jumlah			83.950	-

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

2.2. Demografis

2.2.1. Penduduk

Data dasar mengenai kependudukan yang banyak digunakan terutama adalah data yang berkaitan dengan jumlah dan struktur penduduk. Data jumlah dan struktur penduduk pada pembangunan digunakan sebagai rujukan untuk memperkirakan jumlah SDM atau tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan pembangunan, sedangkan sebagai output pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk digunakan untuk menentukan beberapa kelompok sasaran (*target*

groups) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin, dan lansia.

Salah satu jenis data dasar kependudukan yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan daerah adalah data mengenai struktur demografis penduduk atau biasa dikenal dengan komposisi penduduk menurut umur/kelompok umur, antara lain digunakan untuk menentukan kelompok sasaran pembangunan yang ditetapkan berdasarkan umur.

Tabel 2.3 berikut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Maluku cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2010-2013. Jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2010 sebanyak 1.531.042 jiwa meningkat menjadi 1.628.400 jiwa pada tahun 2013.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Maluku Menurut Jenis Kelamin, 2010-2013

Tahun	Jumlah Penduduk		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	773.585	757.817	1.531.402
2011	791.575	774.748	1.566.323
2012	807.100	792.400	1.599.500
2013	821.600	806.800	1.628.400

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2014

Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin pada 2013 seperti disajikan dalam tabel 2.4 berikut menunjukkan bahwa terdapat 8 Kabupaten yang memiliki rasio penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan, sebaliknya 3 Kabupaten/Kota yakni Maluku Tenggara, Kota Ambon dan Kota Tual rasio penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sedangkan sebaran penduduk sebagian besar terkonsentrasi di 3 (tiga) kabupaten/kota, yaitu Kota Ambon sebesar 399.405 jiwa, Kabupaten Maluku Tengah sebesar 368.556 jiwa, dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 169.000 jiwa.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Maluku Tenggara Barat	55 217	54 583	109 800
2	Maluku Tenggara	48 386	50 142	98 528
3	Maluku Tengah	186 028	182 528	368 556
4	Buru	64 085	60 900	124 985
5	Kepulauan Aru	46 783	43 533	90 316
6	Seram Bagian Barat	86 002	82 998	169 000
7	Seram Bagian Timur	54 611	52 517	107 128
8	Maluku Barat Daya	36 334	35 743	72 077
9	Buru Selatan	29 932	28 540	58 472
10	Kota Ambon	199 541	199 864	399 405
11	Kota Tual	32 835	33 529	66 364

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Dari aspek struktur umur menunjukkan bahwa penduduk Maluku masih tergolong penduduk “muda” sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5. Kondisi ini tercermin dari proporsi penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun masih cukup tinggi yakni sebesar 35,34% pada tahun 2010 dan sedikit meningkat menjadi 36,86% pada tahun 2013.

Proporsi penduduk usia tidak produktif khususnya kelompok umur 0-14 menunjukkan angka beban ketergantungan. Pada tahun 2010 angka beban ketergantungan sebesar 65,28, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 65 penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2013, angka beban ketergantungan naik menjadi 69,33 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 69 penduduk usia tidak produktif.

Tabel 2.5.
Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan
di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2013

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	≥65 Tahun	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	35,34	60,51	4,16	65,28
2011	36,66	59,61	3,74	67,77
2012	36,65	59,26	4,09	68,76
2013	36,86	59,06	4,08	69,33

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2014

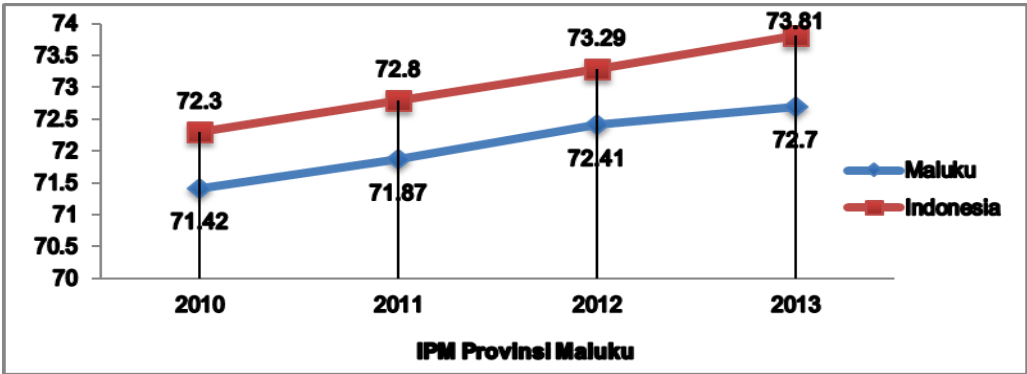
2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia
2.2.2.1. Perkembangan Pembangunan Manusia Maluku

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, yang merupakan indeks komposit yang memadukan ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan dalam satu indeks komposit.

Sebagaimana disajikan dalam gambar 1.2 berikut diketahui bahwa IPM Provinsi Maluku cenderung meningkat dari tahun 2010 sebesar 71,42 menjadi 72,7 pada tahun 2013, atau dengan rata-rata capaian selama periode 2010-2013 sebesar 72,1. Angka rata-rata IPM ini menunjukkan bahwa Provinsi Maluku berada pada “kategori menengah atas”.

Grafik 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku tahun 2010-2013



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2014

Meskipun IPM Maluku meningkat, namun jika kita lihat peringkat Maluku selama periode 2010-2013 terus menurun. Maluku menempati peringkat 20 dari seluruh provinsi pada 2010, namun melorot menjadi peringkat 22 pada tahun 2013. Hal ini disebabkan antara lain karena reduksi *shortfall* yang dicapai provinsi lain lebih tinggi dibandingkan Maluku atau dengan kata lain pencapaian IPM provinsi lain yang jauh lebih agresif dari apa yang sudah dicapai Maluku.

2.2.2.2. Disparitas Pembangunan Manusia

Berdasarkan skala baku internasional, Provinsi Maluku termasuk dalam kategori IPM menengah atas. Akan tetapi, angka IPM Maluku 2013 yang mencapai 72,70 masih menyembunyikan fakta bahwa masih terdapat jurang yang cukup jauh antara Kota Ambon (IPM tertinggi, 79,58) dengan Kabupaten Maluku Barat Daya (IPM terendah, 67,67), yang berbeda nyaris 11,91 poin. Berdasarkan kategori tersebut, seluruh kabupaten/kota di Maluku sudah termasuk kategori menengah atas.

Dari tabel 2.6 berikut terlihat bahwa Kota Ambon masih menempati peringkat pertama dengan IPM mencapai 79,58, disusul Kota Tual merupakan daerah dengan IPM tertinggi ke-2 dengan pencapaian IPM sebesar 77,91. Kabupaten dengan IPM paling rendah di Maluku pada 2013 adalah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yaitu sebesar 67,67, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sedikit lebih baik dengan IPM 69,11, dan Kabupaten Buru Selatan dengan IPM 70,23.

Tabel 2.6
IPM Kabupaten/Kota dan Maluku, 2013

Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat Daerah
(1)	(2)	(3)
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	69,87	8
Kabupaten Maluku Tenggara	73,60	3
Kabupaten Maluku Tengah	71,81	4
Kabupaten Kepulauan Aru	71,29	5
Kabupaten Buru	70,75	7
Kabupaten Seram Bagian Barat	70,75	6
Kabupaten Seram Bagian Timur	69,11	10
Kabupaten Maluku Barat Daya	67,67	11
Kabupaten Buru Selatan	70,23	9
Kota Ambon	79,58	1
Kota Tual	77,91	2
Maluku	72,70	22 (Nasional)

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2014

Keberhasilan pembangunan manusia penting, tetapi tidak cukup hanya dilihat dari pencapaian IPM maupun peringkatnya saja, namun penting juga jika analisis diperdalam dengan melihat pencapaian reduksi shortfall, yang mengukur keberhasilan pencapaian IPM dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM=100). Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Oleh karenanya, kabupaten/kota dengan reduksi shortfall yang lebih tinggi dapat dikategorikan sebagai daerah yang telah memiliki kesadaran dan perhatian yang lebih akan pembangunan manusia.

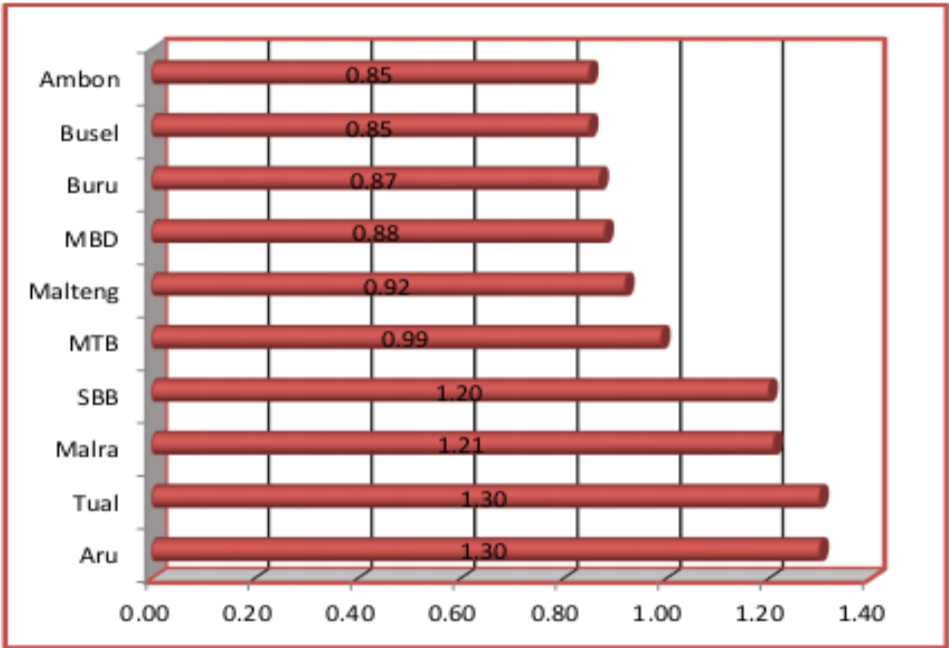
Dalam grafik 2.2 terlihat bahwa pada tahun 2013, Kabupaten Aru dan Kota Tual adalah peraih reduksi shortfall tertinggi, dimana mencatat angka yang sama untuk kedua daerah tersebut yaitu sebesar 1,30. Dibandingkan dengan tahun 2012, Kabupaten Aru berada pada posisi ke 5 dan Kota Tual peringkat ke 3. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aru dan Kota Tual telah meningkatkan prioritas dan fokus untuk pembangunan sumberdaya manusia.

Posisi reduksi shortfall terendah yakni Kota Ambon yaitu 0,85. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pembangunan sumber daya manusia di Maluku berjalan dengan baik, dimana Kota Ambon sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Maluku telah sampai pada titik puncak dimana Pemerintah Kota diharapkan dapat mempertahankan capaian tersebut, sementara upaya daerah lain untuk mempercepat pembangunan manusia terlihat sangat nyata. Jika pada tahun 2012 reduksi shortfall tertinggi Kabupaten Buru Selatan, maka pada Tahun 2013 diraih oleh Kabupaten Aru. Demikian halnya dengan reduksi shortfall terendah jika pada tahun 2012 diraih oleh Kabupaten Seram Bagian Barat maka pada tahun 2013 diraih oleh Kota Ambon.

Di sisi lain, perhatian akan pembangunan manusia yang lebih serius diharapkan dari pemerintah daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), selain tercatat sebagai daerah dengan IPM terendah di Maluku, reduksi *shortfall* MBD juga tidak terlalu tinggi, yaitu sebesar 0,88 hanya meningkat lebih tinggi dari pencapaian

tahun sebelumnya sebesar 1,2. Jika tidak ada prioritas dan fokus pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan serta meningkatkan pendapatan masyarakat, MBD akan selalu tertinggal di antara daerah lain di Maluku.

Grafik 2.2
Reduksi *shortfall* IPM kabupaten/kota, Tahun 2012 - 2013



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2014

Kecenderungan yang menggembirakan adalah Kota Ambon yang telah mencapai angka IPM tertinggi di Maluku dan juga relatif tinggi secara nasional, namun masih mencapai reduksi shortfall yang tinggi pula. Hal ini tidak lain mengindikasikan masih besarnya peluang Kota Ambon untuk terus memperbaiki kualitas manusia di daerahnya dan mencapai IPM yang lebih tinggi lagi di masa yang akan datang.

Laju kecepatan peningkatan IPM yang diindikasikan angka reduksi shortfall akan tergantung pada tinggi rendahnya angka IPM yang telah dicapai. Sebagai ilustrasi, suatu daerah akan cukup sulit untuk meningkatkan angka IPM jika angka IPM sebelumnya sudah tergolong tinggi (*hardrock*). Sebaliknya, akan sangat mudah bagi daerah yang masih memiliki IPM tergolong rendah untuk meningkatkan kecepatan peningkatan IPM (*softrock*). Walau demikian, kasus di Maluku cukup menarik yaitu Kota Ambon dengan IPM tertinggi masih mencatatkan reduksi shortfall yang tinggi pula. Sekali lagi, pembangunan manusia sangat membutuhkan *political will* yang kuat dari segenap pimpinan daerah baik legislatif maupun eksekutif.

2.3. Aspek kesejahteraan Masyarakat

2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dalam tabel 2.6 berikut diketahui bahwa Perekonomian Provinsi Maluku berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 mencapai 9.59 trilyun Rupiah meningkat menjadi 15,28 trilyun rupiah pada tahun 2014.

Tabel 2.7
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2000 menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Maluku Tahun 2011-2014 (Rp. Juta)

NO	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(5)	(6)		
1.	Pertanian	2.860.213,57	3.283.086,79	3.737.711,88	4,212,892.90
2.	Pertambangan dan penggalian	74.452,89	87.552,39	96.392,32	106,561.36
3.	Industri Pengolahan	425.275,79	519.579,20	608.566,05	724,101.90
4.	Listrik dan Air Bersih	52.117,59	57.618,21	62.881,92	68,616.64
5.	Bangunan	187.013,01	222.150,41	262.234,68	304,782.72
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.713.767,78	3.292.493,23	3.875.774,58	4,540,010.49
7.	Angkutan dan Komunikasi	980.621,61	1.147.880,92	1.331.892,12	1,562,870.04
8.	Kuangan, Persewahan dan Jasa Perusahaan	404.925,11	458.505,75	512.978,55	585,150.40
9.	Jasa-Jasa	1.900.702,47	2.399.902,36	2.756.915,24	3,183,792.34
TOTAL		9.599.089,82	11.468.769,26	13.245.347,34	15,288,778.79

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2015

Pada tabel 2.7 berikut terlihat bahwa struktur ekonomi Provinsi Maluku selama tahun 2010-2014 didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama, yakni sektor Pertanian, sektor Perdagangan, hotel dan restoran dan sektor Jasa-jasa, dengan rata-rata kontribusi selama periode 2014 sebesar 78.08%. Sedangkan kontribusi enam sektor lainnya hanya sebesar 21,92 persen.

Sektor Pertanian memiliki kontribusi tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 31,97 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 28,95 persen dan Sektor jasa-jasa sebesar 17,59 persen. Tahun 2014 struktur ekonomi Maluku mengalami perubahan, yakni jika tahun 2010 sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar, maka pada tahun 2014 sektor Perdagangan Hotel dan restoran memberikan kontribusi yang paling besar yakni sebesar 29,70 persen, sedangkan sektor pertanian menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 27,56 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 20,82 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran perekonomian daerah Maluku dari sektor primer (Pertanian) ke sektor tersier, yakni sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Jasa-jasa dan sektor Angkutan dan Komunikasi.

Tabel 2.8
Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha
Di Provinsi Maluku Tahun 2010-2014 (%)

NO	LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
-1	-2	-3	-4	-5-	-6-	-7-
1	Pertanian	31.97	29.81	28,08	28,20	27.56
2	Pertambangan dan penggalian	0.73	0.73	0,76	0,72	0.70
3	Industri Pengolahan	4.42	4.43	4,53	4,62	4.74
4	Listrik dan Air Bersih	0.59	0.54	0,50	0,45	0.45
5	Bangunan	1.89	1.95	1,94	1,99	1.99
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	28.95	28.28	29,15	29,15	29.70
7	Angkutan dan Komunikasi	9.38	10.22	10,03	9,93	10.22
8	Keuangan, Persewahan dan Jasa Perusahaan	4.48	4.22	4,95	3,81	3.83
9	Jasa-Jasa	17.59	19.81	21,05	21,11	20.82
TOTAL		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2015

Kinerja perekonomian daerah Provinsi Maluku selama tahun 2011-2014 seperti tercantum dalam tabel 2.8 berikut menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku atas dasar harga konstan pada tahun 2011 sebesar 4,5 trilyun rupiah telah meningkat menjadi 5,46 trilyun rupiah pada tahun 2014.

Sektor Pertanian memiliki PDRB tertinggi yaitu sebesar 1,37 trilyun rupiah pada tahun 2011 meningkat menjadi 1,59 trilyun rupiah pada tahun 2014, diikuti Sektor Perdagangan, hotel dan restoran dengan PDRB sebesar 1,16 trilyun rupiah pada tahun 2011 meningkat menjadi 1,49 trilyun rupiah pada tahun 2014, kemudian sektor Jasa-jasa dengan PDRB sebesar 879,04 milyar rupiah pada tahun 2011 meningkat menjadi 1,06 trilyun rupiah pada tahun 2014. Ini berarti, pada tahun 2014 sektor pertanian memiliki PDRB yang lebih tinggi dibandingkan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

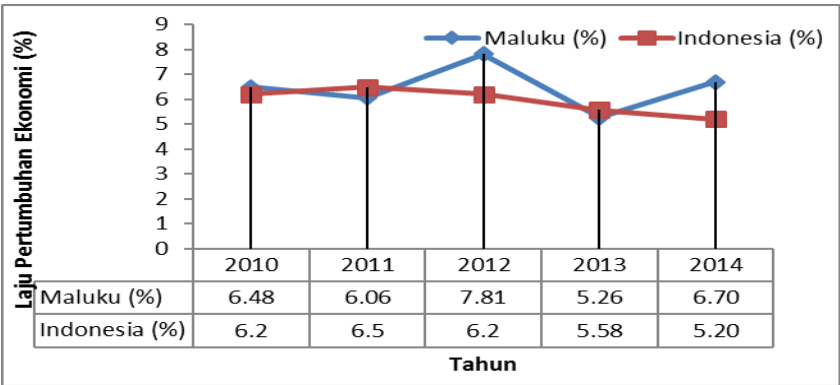
Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Maluku tahun 2011-2014 (Rp.Juta)

NO	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian	1.377.544,76	1.458.218,14	1.517.677,21	1,592,550.28
2.	Pertambangan dan penggalian	33.417,56	38.200,78	39.178,55	41,182.03
3.	Industri Pengolahan	217.021,50	234.164,31	248.461,93	271,620.61
4.	Listrik dan Air Bersih	21.753,46	23.222,39	24.257,91	25,406.36
5.	Bangunan	87.238,74	93.285,97	100.167,22	108,139.54
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.169.115,93	1.282.675,22	1.369.997,01	1,491,923.82
7.	Angkutan dan Komunikasi	490.018,25	527.268,12	558.971,21	602,844.41
8.	Keuangan, Persewahan dan Jasa Perusahaan	232.183,59	243.013,48	251.299,97	267,196.38
9.	Jasa-Jasa	879.042,35	961.301,55	1.001.298,38	1,064,734.83
TOTAL		4.507.336,14	4.861.349,96	5.111.309,39	5,465,598.26

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2015

Meskipun Perekonomian Daerah terus mengalami peningkatan selama periode 2010-2014, namun laju pertumbuhannya berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2010 mencapai 6,48 persen, naik menjadi 6,70 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 2014 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,20).

Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Maluku dan Indonesia tahun 2010-2014



Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2015

Tabel 2.8 berikut menyajikan PDRB Provinsi Maluku tahun 2013 dari komponen permintaan, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal atau Investasi, dan Ekspor-Impor.Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto. Kontribusi terbesar yakni Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencapai 72,96%, diususul impot sebesar 42,82%.

Tabel 2.10.
Distribusi Persentase PDRB Menurut Penggunaan
Tahun 2012 - 2013 (Persentase) Atas Dasar Harga Berlaku 2000

Komponen	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	69,48	72,96
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta		
Nirlaba	1,71	1,62
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	35,27	37,74
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,14	7,08
Ekspor Barang dan Jasa	23,27	21,70
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	39,17	42,82
PDRB	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2014

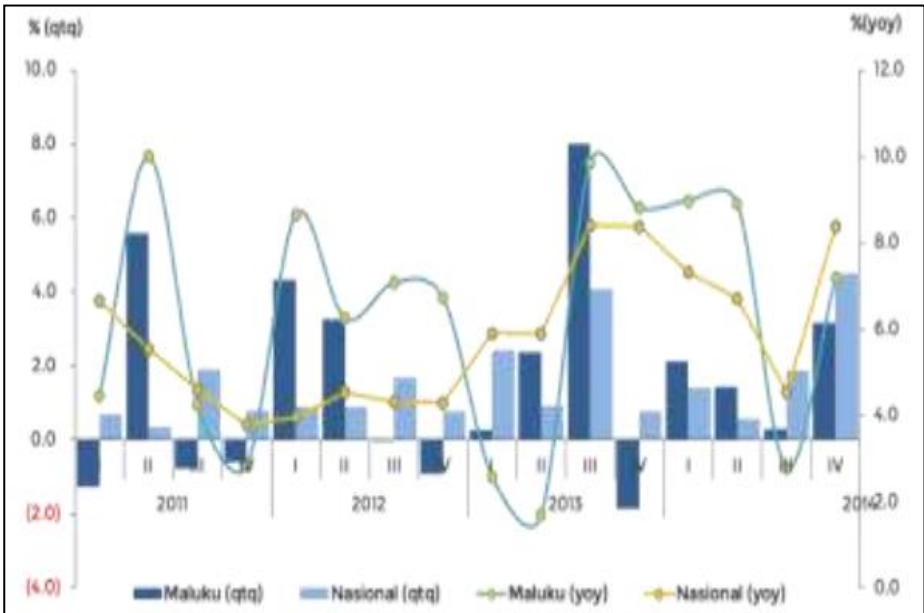
Pembentukan modal tetap domestik meskipun meningkat, namun masih memiliki andil yang relatif kecil. Demikian pula, Ekspor Maluku meskipun tumbuh dan memiliki peranan yang cukup besar, namun masih lebih rendah dari impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Provinsi Maluku dari komoditi daerah atau wilayah lain masih tinggi.

2.3.2. Perkembangan inflasi Daerah

Perkembangan inflasi Provinsi Maluku pada triwulan IV-2014 menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan, sebagai dampak dari kebijakan administered prices, pelemahan kurs, musim kering yang berkepanjangan, dan hari-hari besar nasional dan keagamaan. Pencapaian inflasi Provinsi Maluku pada triwulan IV-2014 adalah 7,19% (yoy), lebih tinggi dari inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,79% (yoy). Kenaikan harga BBM bersubsidi pada akhir November berdampak pada kenaikan harga komoditas sub kelompok transportasi dan komoditas sub kelompok biaya tempat tinggal, sebagai passthrough-effect dari meningkatnya biaya angkut bahan bangunan. Selain itu, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan pelemahan kurs mendorong harga bahan bangunan, khususnya semen. Pada kelompok bahan makanan, tekanan inflasi datang dari komoditas beras dan cabai akibat panjangnya musim kemarau yang berdampak pada mundurnya musim tanam. Dari sisi demand, perayaan hari raya idul adha, natal, dan tahun baru ikut memberikan tekanan inflasi, terutama pada kelompok bahan makanan dan sub kelompok transportasi, khususnya angkutan udara. Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sulampua, inflasi Provinsi Maluku termasuk tiga terendah. Secara umum, inflasi di provinsi dalam wilayah Sulampua mengalami peningkatan. Beberapa provinsi dengan pencapaian inflasi di bawah nasional diantaranya adalah Provinsi Papua Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku. Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan inflasi tahunan tertinggi di wilayah Sulampua pada triwulan laporan dengan inflasi sebesar 9,67%

(yoy), sementara inflasi terendah di Sulampua pada tri wulan laporan adalah Provinsi Gorontalo, dengan inflasi sebesar 6,14% (yoy).

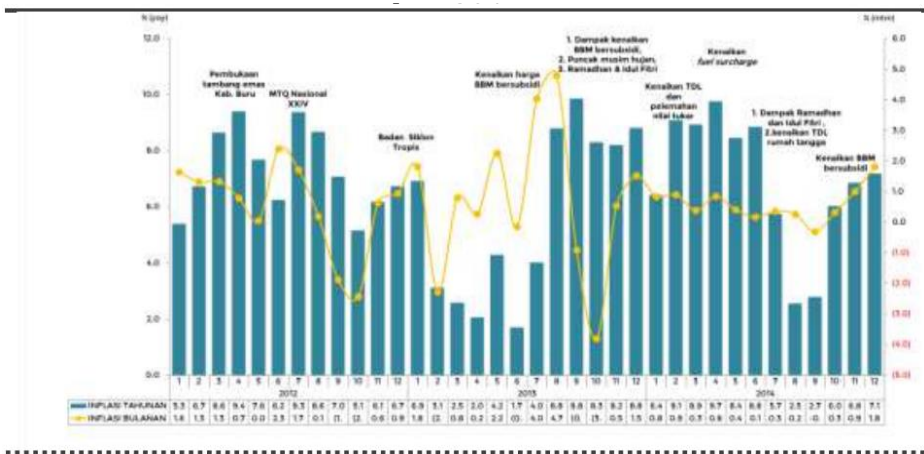
Grafik 2.4. Inflasi Maluku dan Inflasi Nasional
Triwulan IV Tahun 2014



Sumber : KEK BI Triwulan IV - 2014

Dari sisi penawaran, inflasi pada triwulan laporan disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan TDL, cuaca, dan pelemahan kurs. Kenaikan harga BBM bersubsidi mendorong kenaikan tarif angkutan umum, baik dalam kota dan antar kota. Passthrough-effect dari kenaikan harga BBM bersubsidi juga ikut menyebabkan kenaikan harga komoditas biaya tempat tinggal, melalui naiknya biaya transportasi. Khusus pada komoditas semen, kenaikan harga juga dipengaruhi oleh tergerusnya margin perusahaan akibat kenaikan biaya bahan baku impor akibat kurs, dan kenaikan conversion cost akibat kenaikan berkala TDL industri. Di sisi lain, panjangnya musim kemarau membuat jadwal musim tanam komoditas beras dan cabai mundur. Mundurnya musim tanam mengganggu kecukupan pasokan kedua komoditas tersebut, yang kemudian memberikan tekanan pada stabilitas harga.

Grafik 2.5. Perkembangan Inflasi Provinsi Maluku & Event Analysis



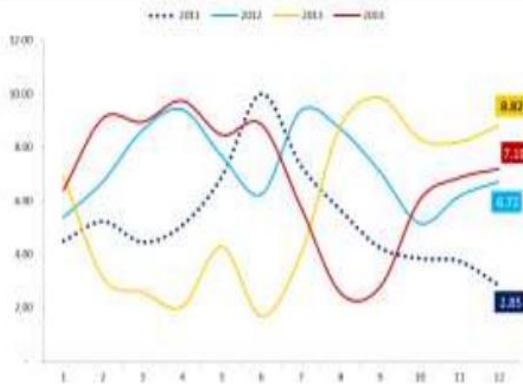
Sumber : KEK BI Triwulan IV - 2014

Dari sisi permintaan, kenaikan inflasi dipengaruhi oleh hari-hari besar nasional dan keagamaan. Pada triwulan laporan, inflasi pada sub-kelompok transportasi dipengaruhi oleh faktor memuncaknya demand atas angkutan udara. Peningkatan permintaan ini terkait dengan banyaknya perayaan hari besar nasional dan keagamaan, seperti hari raya idul adha, hari raya natal, dan tahun baru. Perayaan hari-hari besar ini juga memberikan tekanan inflasi pada beberapa komoditas bahan makanan, terutama pada sub-kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya, sub-kelompok telur, susu, dan hasil-hasilnya serta sub-kelompok bumbu-bumbuan.

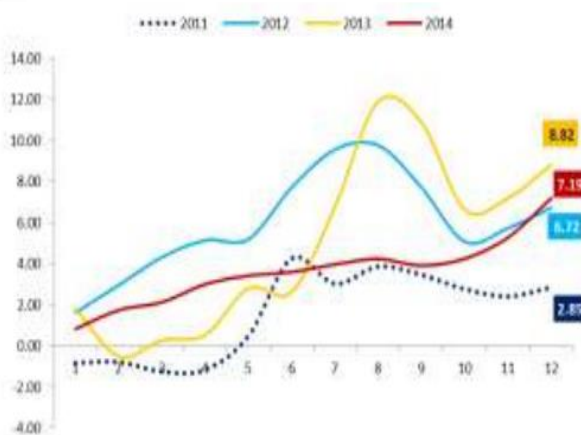
2.3.3. Inflasi Tahunan dan Inflasi Kumulatif

Inflasi Provinsi Maluku pada triwulan IV-2014 menunjukkan kenaikan dibanding triwulan sebelumnya. Sebagaimana terlihat dalam grafik 3-3 di bawah, Inflasi tahunan Maluku pada triwulan laporan adalah sebesar 7,19% (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi tahunan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,78% (yoy), namun lebih rendah dari inflasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,82% (yoy). Secara umum inflasi tahunan Maluku mengalami kenaikan pada triwulan IV 2014, terlihat lebih tinggi dari pola historisnya, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Grafik 2.6. Perbandingan Inflasi Tahunan Maluku Tahun 2011 - 2014



Grafik 2.7. Perbandingan Inflasi Kumulatif Maluku Tahun 2011 - 2014



Sumber : KEK BI Triwulan IV - 2014

Tingginya laju inflasi pada triwulan laporan merupakan akibat dari kenaikan harga BBM dan faktor cuaca, yang mendorong kenaikan harga-harga komoditas transportasi, bahan bangunan, dan volatile foods. Kenaikan harga BBM meningkatkan ongkos transportasi, terutama untuk bahan bangunan yang diangkut oleh truk-truk yang membutuhkan bahan bakar dalam jumlah yang besar. Namun demikian, passthrough-effect dari kenaikan harga BBM pada komoditas bahan makanan tidak sebesar tahun 2013. Hal ini tidak lepas dari peran aktif TPID Maluku dalam menjaga kecukupan bahan makanan dan ekspektasi masyarakat di Kota Ambon. Komoditas yang selama ini persisten menjadi penyebab inflasi, yaitu sayur-sayuran dan ikan segar, mengalami inflasi rendah,

bahkan ikan segar mengalami deflasi. Tekanan inflasi justru datang dari komoditas padi-padian dan bumbu-bumbuan, yaitu beras, cabai merah, dan cabai rawit. Mundurnya musim tanam di sentra-sentra produksi akibat kemarau yang berkepanjangan membuat kecukupan pasokan beberapa komoditas volatile foods tersebut.

Inflasi kumulatif Provinsi Maluku pada triwulan IV-2014 sebesar 7,19% (ytd), lebih rendah dibanding inflasi kumulatif triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,91% (ytd). Dibandingkan dengan nasional, laju inflasi kumulatif Provinsi Maluku pada triwulan laporan lebih rendah dari inflasi kumulatif nasional yang sebesar 8,36% (ytd). Laju inflasi kumulatif Maluku yang pada triwulan laporan berada di bawah inflasi kumulatif nasional disebabkan tingginya tekanan inflasi nasional dari kelompok bahan makanan. Andil komoditas bahan makanan dalam inflasi nasional mencapai 2,06%, didorong oleh inflasi beras, cabai merah, dan cabai rawit. Sedangkan tekanan inflasi bahan makanan Provinsi Maluku lebih terkendali, dengan andil hanya sebesar 0,3972% untuk Kota Ambon dan 0,5328% untuk Kota Tual.

2.3.4. Kemiskinan

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan masih menjadi fokus Pemerintah Daerah dengan melanjutkan percepatan penanggulangan kemiskinan di Maluku. Pada tabel 2.9 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dari 378,630 orang pada tahun 2010 menjadi 307.020 orang pada tahun 2014. Sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Maluku, tingkat kemiskinan juga telah turun dari 27,74% pada tahun 2010 menjadi 18,44% pada tahun 2014.

Tabel 2.11
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Maluku Menurut Daerah,
Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	36,350	342,280	378,630	10,20	33,94	27,74
2011	56,490	299,920	356,400	9,59	30,03	22,45
2012	51.100	287.790	338.890	8,39	28,12	20,76
2013	51.110	271.400	322.510	7,96	26,30	19,27
2014	47.580	259.440	307.020	7,35	25,49	18,44

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2015

*) September 2014

Sebagaimana disajikan dalam tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2010-2014, penduduk miskin di daerah perdesaan masih lebih banyak dibandingkan daerah perkotaan. Meskipun demikian, untuk penduduk miskin perdesaan terlihat adanya penurunan setiap tahun, sebaliknya untuk penduduk

miskin perkotaan terlihat adanya peningkatan setiap tahun. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan pada tahun 2010 sebesar 342,280 orang turun menjadi 259.440 orang pada tahun 2014 atau berkurang sebanyak 82.840 orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan dari 36,350 orang pada tahun 2010 menjadi 47.580 orang pada tahun 2014 atau bertambah sebanyak 11.230 orang.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, dimana penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Sebagaimana disajikan dalam tabel 2.10 berikut diketahui bahwa garis kemiskinan Maluku sebesar Rp.226.030,- pada tahun 2010 telah meningkat menjadi Rp.361.022,- pada tahun 2014.

Tabel 2.12
Garis Kemiskinan Maluku, 2010- 2014

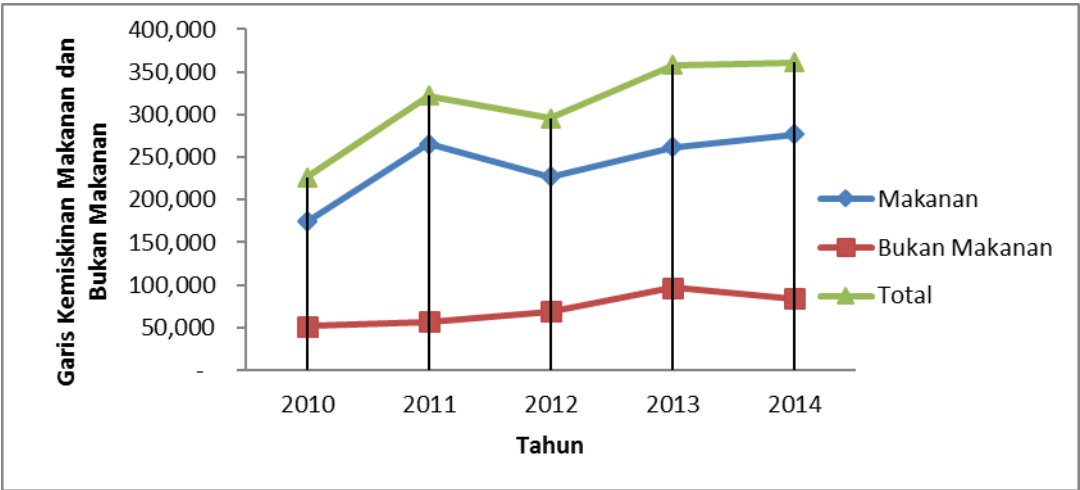
Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)				
	Makanan	Bukan Makanan	Kota	Desa	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	174.525	51.504	249.895	217.599	226.030
2011	265.120	56.627	265.120	233.120	245.120
2012	227.176	68.728	314.855	284.629	295.904
2013	261.704	96.364	346.599	339.446	322.510
2014	277.022	84.021	369.738	355.478	361.022

Sumber : BPS Porvinsi Maluku, 2015

Ket : *): data September 2014

Komponen Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), dimana peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Selama September 2013 - September 2014 Garis Kemiskinan naik sebesar 11,9 persen, yaitu dari Rp 322.510,- per kapita per bulan pada September 2013 menjadi Rp 361.022,- per kapita per bulan pada September 2014. Dengan memperhatikan Grafik 2.6 komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), maka peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan September 2014, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 76,7 persen.

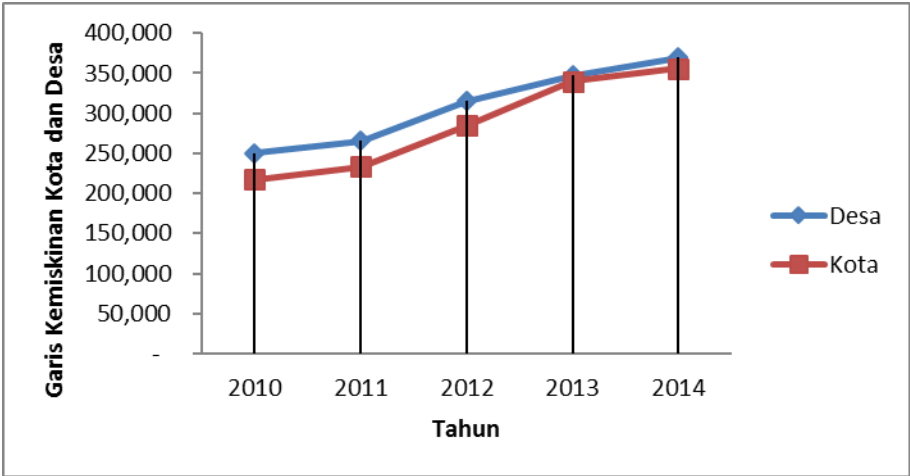
Grafik 2.6.
Garis Kemiskinan Provinsi Maluku menurut Makanan dan Bukan Makanan
Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Porvinsi Maluku, 2015

Dengan memperhatikan gambar 2.7 berikut, diketahui bahwa Garis kemiskinan di Provinsi Maluku cenderung meningkat selama tahun 2010-2014 dan Garis Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada perdesaan. Garis kemiskinan di perkotaan pada tahun 2010 sebesar Rp.249.895,- meningkat menjadi Rp. 369.738,- per kapita per bulan pada tahun 2014. Sementara itu, garis kemiskinan di perdesaan pada tahun 2010 sebesar Rp. 217.599,- meningkat menjadi Rp355.478,- rupiah per kapita per bulan pada ahun 2014.

Gambar 2.7.
Garis Kemiskinan Provinsi Maluku menurut Kota dan Desa
Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Porvinsi Maluku, 2015

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dari kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (yang kerap dinotasikan dengan P1) merupakan indeks yang merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan (yang kerap dinotasikan dengan P2) merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin.

Pada tabel 2.9 berikut ditunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan mengalami perbaikan atau penurunan dari 5,23 pada tahun 2010 menjadi 4,11 pada tahun 2014. Pada periode September 2013 – September 2014 indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan yakni dari 3,52 menjadi 4,11.

Sementara itu, Indeks Keparah Kemiskinan turun dari 1,47 dari tahun 2010 menjadi 1,37 pada tahun 2014. Sedangkan pada periode September 2013 – September 2014 Indeks Keparah Kemiskinan naik dari 0,93 menjadi 1,37. Peningkatan nilai kedua indeks ini perlu mendapat perhatian karena kesenjangan antara perbaikan standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan masih belum baik.

Tabel 2.13
Indeks Kedalaman (P1) dan Keparah Kemiskinan (P2)
Provinsi Maluku Tahun 2010-2014

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2010	1,36	6,59	5,23
Maret 2011	1,98	6,77	4,99
September 2011	1,97	6,15	4,60
Maret 2012	1,74	6,24	4,56
September 2012	1,61	6,03	4,38
Maret 2013	1,49	5,30	3,88
September 2013	1,13	5,00	3,52
Maret 2014	1,53	5,23	3,80
September 2014	1,14	5,99	4,11
Indeks Keparah Kemiskinan (P2)			
Maret 2010	0,27	1,90	1,47
Maret 2011	0,55	2,13	1,13
September 2011	0,59	1,77	1,34
Maret 2012	0,42	1,91	1,36
September 2012	0,46	1,81	1,31
Maret 2013	0,41	1,61	1,16
September 2013	0,24	1,36	0,93
Maret 2014	0,52	1,49	1,12
September 2014	0,26	2,08	1,37

Sumber : BPS Porvinsi Maluku, 2015

Dari tabel di atas diketahui bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparah Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan September 2014, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

untuk perkotaan hanya 1,14 sementara di daerah perdesaan mencapai 5,99. Sedangkan, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan sebesar 0,26 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,08. Hal ini mengindikasikan bahwa intensitas kemiskinan di daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan intensitas di daerah perkotaan.

Peningkatan indeks kedalaman dan keparahan untuk kemiskinan di perdesaan dari tahun 2013 naik pada tahun 2014 perlu mendapat perhatian agar penurunan angka kemiskinan (*headcount ratio*) juga diikuti dengan perbaikan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.3.5. Ketenagakerjaan

Tabel 2.12 berikut menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Maluku terus mengalami perubahan selama periode 2010-2014. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2010 mencapai 586.430 orang telah meningkat menjadi 601.651 orang pada tahun 2014. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2014 turun dibandingkan tahun 2013 yakni dari 602.429 orang turun menjadi 601.651 orang.. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka sedikit mengalami peningkatan dari 66.292 orang (9,91%) pada Agustus 2013 menjadi 70.653 orang (10,51%) pada Agustus tahun 2014. Meningkatnya jumlah pengangguran pada tahun 2014 antara lain disebabkan oleh pertambahan angkatan kerja baru lebih cepat dibandingkan lapangan kerja baru yang tersedia.

Peningkatan penawaran kesempatan kerja di Maluku tidak selalu diikuti dengan peningkatan yang memadai pada permintaan tenaga kerja atau kesempatan kerja. Hal ini menyebabkan sebagian tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan atau akan menjadi pengangguran. Kondisi ini dapat dilihat dari peningkatan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2010 sebesar 66,48% turun menjadi 61,92% pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 turun menjadi 60,92 %. Penurunan TPAK juga disebabkan oleh menurunnya angkatan kerja pada tahun 2013 dan tahun 2014.

Tabel 2.14.
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama
di Provinsi Maluku 2010-2014

Kegiatan Utama	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	979.714	1.010.287	1.035.915	1,079.849	1.103.643
Angkatan Kerja	651.339	701.893	659.953	668.721	672.304
- Bekerja	586.430	650.112	610.362	602.429	601.651
- Pengangguran Terbuka	64.909	51.781	49.591	66.292	70.653
Bukan Angkatan Kerja	328.375	308.394	375.962	411.128	431.339
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %)	66,48	69,47	63,71	61,92	60.92
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT %)	9,97	7,38	7,51	9,91	10.51

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2015

Ket : *) = Data Agustus 2013

**) = Data Agustus 2014

Tabel 2.13 berikut menyajikan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran menurut wilayah Kota-Desa dan Jenis Kelamin. Dilihat dari aspek kewilayahan, telah terjadi penurunan tingkat pengangguran di daerah perkotaan dari 14,48% pada tahun 2010 menjadi 12,35% pada tahun 2014. Sebaliknya di daerah pedesaan mengalami peningkatan pengangguran terbuka dari 7,96% pada tahun 2010 menjadi 9,32% pada tahun 2014. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2014 pengangguran di kota mengalami penurunan sedangkan di perdesaan sebaliknya meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengangguran di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan namun di perdesaan perlu mendapat perhatian pemerintah karena angkatan kerja di desa lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, selain itu tingkat penyediaan lapangan kerja di perdesaan masih sangat terbatas.

Tabel 2.15.
Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja dan Persentase Pengangguran
Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku 2010 – 2014

Tahun	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Lk	Pr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010					
- Angkatan Kerja	200.588	450.751	386.994	264.345	651.339
- Bekerja	171.546	414.884	361.051	225.379	586.430
- Pengangguran (%)	14,48	7,96	6,70	14,74	9,97
2011					
- Angkatan Kerja	245.027	456.866	-	-	701.893
- Bekerja	218.566	431.546			650.112
- Pengangguran (%)	10,80	5,54	-	-	7,38
2012					
- Angkatan Kerja	222.865	437.088	408.496	251.457	659.953
- Bekerja	203.175	407.187	379.729	230.729	610.362
- Pengangguran (%)	8,83	6,84	7,04	8,28	7,51
2013					
- Angkatan Kerja	249.308	414.173	413.559	249.922	663.481
- Bekerja	217.677	381.115	378.197	220.595	610.362
- Pengangguran (%)	12,69	7,98	8,55	11,73	9,75
2014					
- Angkatan Kerja	263.584	408.720	420.278	252.026	672.304
- Bekerja	231.029	370.622	381.598	220.053	601.651
- Pengangguran (%)	12,35	9,32	9,20	12,69	10,51

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2015

Ket : Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

*) = Data Agustus 2014

Sebagaimana disajikan dalam tabel 2.15 berikut, diketahui bahwa selama periode Agustus 2013 – Agustus 2014, terlihat bahwa sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor Pertanian, sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan, serta sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi.

Sektor Pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 287.832 orang atau 48,06% pada tahun 2013, kemudian tahun 2014 sedikit bergeser naik menjadi 289.357 orang atau 48,09%. Demikian juga sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan dengan menyerap tenaga kerja sebesar 120.876 orang atau 20,19% pada tahun 2013 naik menjadi 122.892 orang atau 20,43% pada tahun 2014. Sedangkan sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi mengalami penurunan dalam menyerap tenaga kerja yakni pada tahun 2013 sebesar 83.926 orang atau 14,02% turun menjadi 80.399 orang atau 13,36%.

Tabel 2.16.
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2013-2014

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	AGUSTUS 2013		FEBRUARI 2014		AGUSTUS 2014	
	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	287.832	48,06	343.753	50,55	289.357	48,09
Industri	20.000	3,34	36.337	5,34	20.248	3,37
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	83.926	14,02	26.373	3,88	80.399	13,36
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	120.876	20,19	131.063	19,27	122.892	20,43
Lainnya*)	86.160	14,39	79.912	11,75	88.755	14,75
TOTAL						

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2015

2.4. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mencakup bidang-bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, kependudukan dan keluarga berencana, perpustakaan nasional, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan rangkaian upaya kunci peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

2.4.1. Kesehatan

Salah satu aspek penting dari tingkat kesejahteraan sosial adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dengan menggunakan indikator utama angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara itu, untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian utama. Upaya tersebut antara lain melalui upaya pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan pengadaan/peningkatan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

2.4.1.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Salah satu aspek penting dari tingkat kesejahteraan sosial adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dengan menggunakan indikator utama angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Indikator derajat kesehatan yang dilihat dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup ditunjukkan pada Tabel 2.15, yakni Angka Kematian Bayi pada tahun 2011 sebesar 7,5 per 1000 kelahiran, kemudian meningkat menjadi 14,26 per 1000 kelahiran pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan masing-masing sebesar 10 per 1000 kelahiran dan 9 per 1000 kelahiran. Sementara angka harapan hidup penduduk Maluku pada tahun 2011 adalah 67,7 tahun dan naik menjadi 67,81 tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2013 naik menjadi 67,88 tahun.

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup
di Provinsi Maluku Tahun 2011- 2014

Indikator Derajat Kesehatan	2011	2012	2013	2014
Angka Kematian Bayi	7,5	14,26	10	9
Angka Harapan Hidup	67,7	67,81	67,88	-

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2015

Informasi status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk yang antara lain dapat dilihat melalui indikator kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama sebulan sebelum pencacahan. Tabel 2.17 berikut menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitasnya mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 13,31 persen dibandingkan tahun pada tahun 2011 sebesar 15,70 persen.

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Buru lebih banyak yang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sedangkan bila dilihat menurut jenis kelamin, pada tingkat provinsi angka kesakitan perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 12,17 persen dan 11,63 persen.

Tabel 2.18
Angka Kesakitan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
di Provinsi Maluku, Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	9,80	7,41	8,59
Maluku Tenggara	11,05	15,29	13,13
Maluku Tengah	12,18	12,49	12,34
Buru	18,32	18,61	18,47
Kepulauan Aru	7,66	7,77	7,71
Seram Bagian Barat	17,21	18,23	17,73
Seram Bagian Timur	8,88	9,88	9,39
Maluku Barat Daya	13,05	13,93	13,50
Buru Selatan	8,10	7,23	7,65
Ambon	9,21	10,06	9,63
Tual	11,35	10,50	10,92
Maluku	11,63	12,17	11,90

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2014

2.4.1.2. Pemberian ASI dan Gizi Balita

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi karena selain mengandung nilai gizi yang cukup tinggi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Oleh karena itu, semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya. Berdasarkan tabel 2.17 berikut diketahui bahwa rata-rata lama balita disusui di Maluku mengalami peningkatan dalam periode tahun 2010 sampai 2013, dimana rata-rata lama balita yang disusui pada tahun 2010 adalah 16,92 bulan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 15,82 bulan.

Tabel 2.19.
Persentase Balita Umur 2-4 Tahun Menurut Lamanya Disusui
di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2013

Lama Disusui (Bulan)	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ 5	4,30	5,35	5,46	3,86
6-11	11,93	17,24	13,00	15,39
12-17	43,59	38,47	45,06	43,29
18-23	11,66	15,39	12,44	11,64
≥ 24	28,52	23,55	24,04	25,81
Rata-rata lama disusui	16,92	15,75	15,78	15,82

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2014

Cakupan Bayi 0,6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif Tahun 2014 sesuai Tabel 2.18 yang terbesar cakupannya yakni Kabupaten Buru sebanyak 86 persen disusul Kabupaten Buru Selatan sebanyak 84 persen, kemudian Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 80.4 persen. Sedangkan cakupan ASI Eksklusif yang terendah yakni Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 9,7 persen, disusul Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kota Tual sebesar 11,9 persen.

Tabel 2.20.
Cakupan Bayi 0-6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif
Di Provinsi Maluku Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Sasaran Bayi 0-6 Bulan	Cakupan	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	2.177	260	11,9
Maluku Tenggara	2.220	1.264	56,9
Maluku Tengah	888	714	80,4
Buru	1.146	986	86,0
Kepulauan Aru	1.020	391	38,3
Seram Bagian Barat	2.223	1.355	61,0
Seram Bagian Timur	2.334	1.392	59,6
Maluku Barat Daya	773	75	9,7
Buru Selatan	1.612	1.363	84,6
Ambon	2.830	424	15,0
Tual	1.244	148	11,9
Maluku	14.070	6.848	45,3

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2015

Selain pemenuhan ASI bagi balita, program kecukupan gizi juga sangat penting bagi balita. Sebagaimana tercantum dalam tabel 2.20 berikut diketahui bahwa balita berstatus gizi kurang pada tahun 2010 sebesar 11 persen telah turun menjadi 4,6 persen pada tahun 2014. Persentase balita yang status gizinya baik pada tahun 2010 sebesar 85 persen meningkat menjadi 94,82 persen pada tahun 2014. Sedangkan bayi berstatus “gizi lebih” sedikit meningkat dari 3,93 persen pada tahun 2010 turun menjadi 0,47 persen pada tahun 2014

Tabel 2.21.
Persentase Balita Menurut Status Gizi dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2014 (%)

Status Gizi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Gizi Buruk	0,07	0,21	0,20	0,12	0,12
Gizi Kurang	11,0	7,97	5,70	6,9	4,6
Gizi Baik	85,0	91,31	93,00	92,3	94,82
Gizi Lebih	3,93	0,51	1,10	0,7	0,47
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2015

2.4.1.3. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Salah satu penentu utama untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk adalah ketersediaan dan keterjangkuan fasilitas dan sarana kesehatan. Perkembangan fasilitas kesehatan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.20 menunjukkan adanya peningkatan selama periode tahun 2010 - 2014. Jumlah rumah sakit telah meningkat dari 21 buah pada tahun 2010 menjadi 27 buah pada tahun 2014. Puskesmas sebagai unit terdepan dan sarana utama dalam sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat menunjukkan peningkatan dari 161 buah pada tahun 2010 menjadi 197 buah pada tahun 2014. Demikian pula Posyandu meningkat dari 1.933 buah pada tahun 2010 menjadi 2.137 buah pada tahun 2014 dan Apotek meningkat dari 68 buah pada tahun 2010 menjadi 137 buah pada tahun 2014.

Tabel 2.22
Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Provinsi Maluku,
Tahun 2010-2014

Tahun	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	Apotik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	21	161	1.933	68
2011	21	132	1.866	57
2012	24	179	1.933	110
2013	22	190	2.047	98
2014	27	197	2.137	137

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2015

Faktor penting lainnya untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk adalah ketersediaan tenaga penolong persalinan bayi. Masih banyak masyarakat yang mempercayakan penolong persalinan pada mereka yang bukan tenaga kesehatan, seperti dukun, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan.

Dalam tabel 2.23 berikut diketahui bahwa penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 terdapat 48,11 persen persalinan pertama yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 50,93 persen. Demikian juga pada penolong persalinan terakhir tahun 2011 terdapat 50,78 persen yang ditolong oleh tenaga medis naik menjadi 54,63 persen pada tahun 2013. Penolong persalinan oleh tenaga bidan tahun 2013 memiliki persentase paling tinggi dibanding dengan tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya, yaitu 43,01 persen. Sedangkan persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya masing-masing sebesar 7,33 persen dan 0,59 persen.

Tabel 2.23.
Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan dan Kunjungan Neonatal (KN) di Provinsi Maluku, Tahun 2011 – 2013

Penolong Persalinan	Pertama (KN1)			Terakhir (KN3)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Kesehatan	48,11	50,97	50,93	50,78	52,61	54,63
- Dokter	6,51	8,89	7,33	7,80	9,48	7,60
- Bidan	40,84	41,46	43,01	41,79	42,34	46,46
- Lainnya	0,76	0,62	0,59	1,19	0,79	0,56
Bukan Tenaga Kesehatan	51,89	49,13	49,07	49,21	47,39	45,37
- Dukun Tradisional	47,85	45,53	43,37	46,33	44,85	41,88
- Lainnya	4,04	3,6	5,70	2,88	2,55	3,49

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2014

Sementara itu, persentase penolong persalinan oleh bukan tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari 47,39 persen pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 45,37 persen pada tahun 2013. Penurunan ini disebabkan karena persalinan yang dilakukan oleh tenaga dukun tradisional, yaitu dari 46,33 persen pada tahun 2010 menjadi 41,88 persen pada tahun 2013.

Dalam tabel 2.24 berikut diketahui bahwa untuk penduduk yang berobat sendiri, pengobatan secara modern tetap menjadi pilihan utama mereka, bahkan persentase penduduk yang berobat dengan pengobatan modern mengalami peningkatan dari 87,64 persen tahun 2010 menjadi 90,49 persen tahun 2013. Sementara penduduk yang menggunakan pengobatan tradisional dan lainnya justru mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.24.
Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Pengobatan yang digunakan di Provinsi Maluku Tahun 2010 - 2013

Jenis Pengobatan	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Modern	90,51	89,70	90,93	90,49
Tradisional	26,95	26,28	23,93	27,15
Lainnya	2,28	3,31	3,73	2,18

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2014

Pada tabel 2.25 diketahui puskesmas/pustu merupakan jenis fasilitas kesehatan yang sering digunakan oleh penduduk yang berobat jalan bahwa pada tahun 2013, yakni sebesar 52,32 persen, diikuti praktek dokter sebesar 20 persen dan petugas kesehatan sebesar 21,32 persen.

Tabel 2.25.
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat
di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2013

Tempat Berobat	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sakit	10,01	9,36	8,31	9,64
Praktek Dokter	18,67	14,83	19,67	20,00
Puskesmas/Pustu	61,27	58,69	58,14	52,32
Petugas Kesehatan	13,28	13,81	13,81	21,32
Batra	0,19	0,00	0,03	1,77
Dukun/Lainnya	3,85	3,31	3,88	0,40

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2014

2.5. Pendidikan

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa (termasuk di dalamnya pembangunan pada lingkup kabupaten/kota) adalah suatu keniscayaan, melalui pendidikan bermutu dapat dilahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu row input proses pembangunan. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari, sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan olehnya pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2014 terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Pembangunan di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Baik usia muda maupun tua mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Bagi penduduk usia muda pendidikan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Indikator yang dipakai untuk menilai keberhasilan pembangunan pendidikan antara lain meliputi : Angka melek huruf, Angka pendidikan yang ditamatkan, Angka rata-rata lama sekolah, Angka partisipasi murni, Angka partisipasi kasar.

2.5.1. Angka Melek Huruf (AMH) dan Tingkat Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis serta mngerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari, AMH dapat digunakan untuk :

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perbatasan.
- Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis

Secara umum AMH penduduk di Maluku 10 tahun ke atas pada tahun 2008-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 AMH Provinsi Maluku tercatat 97,55 persen meningkat menjadi 97,84 persen pada tahun 2012, kemudian meningkat 99,50 persen pada tahun 2013 selanjutnya pada tahun 2014 sedikit meningkat menjadi 99,63 persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin, AMH perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Pada tahun 2013 AMH perempuan sebesar 98,25 persen sedangkan laki-laki sebesar 93,35 persen, sedangkan data rincian AMH menurut jenis kelamin belum tersedia.

Tabel 2.26.
Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin
di Provinsi Maluku Tahun 2008 – 2014

Jenis Kelamin	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laki-laki	98,45	98,51	98,34	97,60	97,48	93,35	-
Perempuan	96,65	97,07	97,25	96,27	98,70	98,25	-
Total	97,55	97,87	97,79	96,94	97,84	99,50	99,63

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, 2015

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas seperti disajikan dalam tabel 2.26 berikut. Penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2014 yang sudah menamatkan sekolah pada jenjang SMP ke atas mencapai 31,51 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 31,48 persen. Sementara itu persentase penduduk yang sudah menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sedikit turun dibandingkan tahun lalu, yaitu dari 30,63 persen pada tahun 2013 menjadi 30,16 persen pada tahun 2014. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 16,15 persen pada tahun 2013 naik menjadi 16,36 persen pada tahun 2014 dan jenjang Sekolah Menengah 15,33 persen pada tahun 2013 turun menjadi 15,15 persen di tahun 2014. Sementara itu, persentase penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah dan belum menamatkan Sekolah Dasar pada tahun 2013 mencapai 19,71 persen, turun menjadi 19,51 persen pada tahun 2014.

Tabel 2.27.
Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan
di Provinsi Maluku Tahun 2013 dan 2014

Tingkat Pendidikan	2013			2014		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	19,21	20,21	19,71	19,19	19,89	19,51
Sekolah Dasar	31,40	29,86	30,63	29,80	29,51	30,16
S M P	16,00	17,10	16,15	15,71	17,01	16,36
Sekolah Menengah	14,21	16,45	15,33	14,08	16,22	15,15
Diploma I/II/III	-	-	-			
D IV/S1/S2/S3	-	-	-			
S M P +	22,6	30,22	26,41			

Sumber: Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Maluku, 2015

2.5.2. Rata-rata lama sekolah

Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Berdasarkan tabel 2.26 berikut, diketahui bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2010 baru mencapai 9 tahun dan telah meningkat pada tahun 2013 menjadi 9,6 tahun, kemudian pada 2014 turun menjadi 8,9 tahun. Hal ini berarti, program WAJAR 9 Tahun yang dicanangkan pemerintah telah berhasil dilaksanakan, dan menuju sukses berikutnya yakni program Wajar 12 Tahun. Hal ini terbukti dari meningkatnya rata-rata lama sekolah sehingga mampu menempuh pendidikan sampai kelas 3 SMP. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan, masing-masing 9,1 tahun untuk laki-laki dan 8,7 tahun untuk perempuan.

Tabel. 2.28.
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin
di Provinsi Maluku Tahun 2010-2014

Jenis Kelamin	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	9,2	8,8	8,9	9,1	9,1
Perempuan	8,8	8,4	8,3	8,9	8,7
Total	9,0	8,6	8,6	9,6	8,9

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, 2015

2.5.3. Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Meningkatnya APS berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Pada tabel 2.29 berikut diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) telah meningkat selama periode 2010-2014 untuk semua kelompok umur. Sementara itu, APS pada tahun 2014 untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 111,03 persen, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 98,57 persen dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 94,53 persen. Kondisi ini membuktikan bahwa semakin tinggi kelompok umur semakin rendah angka partisipasi sekolahnya.

Perkembangan APS Kabupaten/Kota selama tahun 2014, menunjukkan bahwa :

- APS tertinggi untuk kelompok umur 7-12 tahun adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar 185 persen dan terendah adalah Kota Ambon sebesar 79 persen.
- APS tertinggi untuk kelompok umur 16-18 tahun adalah Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 112 persen dan terendah adalah Kota Tual sebesar 52 persen.

Tabel 2.29.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku Tahun 2014

Kabupaten/Kota	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	185	86	107
Kabupaten Maluku Tenggara	93	21	77
Kabupaten Maluku Tengah	96	89	65
Kabupaten Buru	102	69	85
Kabupaten Kepulauan Aru	91	72	112
Kabupaten Seram Bagian Barat	91	88	81
Kabupaten Seram Bagian Timur	122	79	72
Kabupaten Maluku Barat Daya	101	41	85
Kabupaten Buru Selatan	92	81	89
Kota Ambon	79	73	78
Kota Tual	93	67	52
Maluku			
2010	98,27	92,86	72,40
2011	98,18	91,89	67,22
2012	114,25	92,11	67,80
2013	115,4	98,28	93,51
2014	111,03	98,57	94,53

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, 2015

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Pada saat ini pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dengan sasaran dari program tersebut adalah anak-anak usia 7-12 tahun (SD) dan 13-15 tahun (SMP).

Tabel 2.30 berikut menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) juga menunjukkan penurunan sejalan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. APM pada tahun 2014 untuk jenjang pendidikan pendidikan SD mencapai 94,66 persen, jenjang pendidikan SLTP sebesar 92,07 persen dan pada jenjang pendidikan SLTA sebesar 84,81 persen.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenjang Pendidikan tahun 2014

Kabupaten/Kota	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	98,71	92,54	83,17
Maluku Tenggara	97,12	91,91	88,27
Maluku Tengah	97,79	95,37	94,32
Buru	93,90	91,16	85,12
Kepulauan Aru	97,87	92,01	83,65
Seram Bagian Barat	97,23	93,49	90,69
Seram Bagian Timur	94,73	91,18	82,87
Maluku Barat Daya	92,20	98,29	82,21
Buru Selatan	88,34	90,17	79,74
Ambon	87,90	95,32	99,45
Tual	95,42	93,14	63,43
Maluku	94,66	92,07	84,81

2.5.4. Rasio Murid-Guru dan Murid-Kelas

Untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan SD dan SMP harus ditunjang dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat terlaksana. Guna mengatasi kekurangan daya tampung siswa, pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan seperti menambah pembangunan unit gedung baru dengan prioritas pada daerah atau kabupaten/kota yang angka partisipasi sekolahnya masih rendah dan daerah terpencil, dan dengan merehabilitasi gedung-gedung SD dan SMP dengan prioritas gedung yang rusak berat. Upaya lainnya dilakukan dengan mengangkat guru kontrak untuk ditempatkan pada sekolah yang kekurangan guru.

Perkembangan fasilitas pendidikan yang digambarkan melalui rasio murid-guru dan rasio murid-kelas selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.31 berikut. Pada tahun ajaran 2013/2014 seorang guru rata-rata mengajar 18 murid SD. Jumlah ini sedikit mengalami peningkatan dari tahun ajaran sebelumnya yaitu sebesar 16 murid. Sedangkan rasio murid terhadap guru pada jenjang pendidikan SMP sebesar 17 murid diajar oleh satu orang guru. Sementara pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, rata-rata 15 murid diajar oleh satu orang guru.

Tabel 2.31.
Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas
di Provinsi Maluku 2010/2011 – 2013/2014

Tahun Ajaran	Rasio Murid-Guru			Rasio Murid-Kelas		
	S D	S M P	S M A	S D	S M P	S M A
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010/2011	23	25	26	30	31	39
2011/2012	16	15	15	22	31	32
2013/2014	18	17	15	24	35	30

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, 2015

Salah satu fasilitas penunjang utama pendidikan adalah ruang kelas, dimana daya tampung kelas terhadap banyaknya murid pada setiap jenjang pendidikan haruslah seimbang. Pada tahun ajaran 2013/2014, sarana pendidikan untuk tingkat SD terlihat cukup memadai dimana setiap kelas menampung sebanyak 24 murid. Sementara banyaknya murid yang belajar di setiap kelas pada jenjang pendidikan SMP selama tahun ajaran 2013/2014 ada sebanyak 35 murid. Sedangkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas setiap kelas dapat menampung 30 murid.

Dengan semakin besarnya rasio murid-kelas yang berbanding lurus dengan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan penyediaan sarana pendidikan belum dapat mengimbangi pertambahan murid.

2.6. Pemuda dan Olahraga

Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan harapan dapat diraihnya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Maluku yang sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerjasama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Langkah-langkah strategis yang mendorong implementasi kebijakan ini perlu disusun agar seluruh pihak dapat terbuka dan melaksanakannya. Dalam upaya meningkatkan sumberdaya dan presetasi pemuda baik di bidang olahraga, maka pada tahun 2015 berbagai kegiatan telah dilakukan yang antara lain : pembinaan generasi muda dan peningkatan ketrampilan dan kemandirian, POPNAS, Festival senam dan trilomba juang, seleksi atlit renang dan voly pantai, pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat, POPCADA, Festival olahraga Tradisional serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga

2.7. Kebudayaan

Provinsi Maluku dikenal sebagai negeri raja-raja, yang kaya akan budaya serta adat dari masyarakat, dimana Adat atau budaya local yang dimiliki senantiasa mengikat dan mengatur kehidupan sehari-hari, seperti : *ain ni ain*, *kalwedo-kidabela*, *pela-gandong*, *tiga batu tungku* dan *masohi*, sekaligus sebagai ciri kehidupan masyarakat adat di Maluku yang senantiasa memegang teguh kebersihan rohani, kesopanan dalam perbuatan dan kebersamaan yang ramah. Kearifan lokal masyarakat adat inilah yang kemudian menjadi dasar penguatan jati diri dan identitas masyarakat Maluku dalam tatanan hidup orang basudara dengan filosofis “*sagu salempeng patah dua*” atau “*potong di kuku, rasa di daging*”, bahkan lebih halus lagi “yang kuat membantu yang lemah” perlu dikembangkan dalam perilaku hidup masyarakat Maluku.

Guna mempertahankan kelestarian budaya yang dimiliki serta meningkatkan Tatanan budaya lokal sebagai modal sosial bagi penciptaan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga, tercipta kualitas kehidupan yang lebih harmonis, maka dilakukan berbagai program dan kegiatan pada tahun 2014, yang antara lain : program pengelolaan kekayaan budaya dimana program ini bertujuan untuk menjaga serta upaya melestarikan benda-benda cagar budaya, serta peninggalan sejarah lainnya sebagai aset wisata yang dimiliki, pembuatan peta objek sejarah dan kepurbakalaan, program keragaman budaya dengan kegiatan : pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, festival budaya daerah dan pengelolaan keragaman budaya.

Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut diharapkan untuk mendorong kebudayaan daerah dalam memberikan arah bagi perwujudan identitas masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan untuk menciptakan iklim kebersamaan yang harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespons perubahan sosial (modernisasi) secara positif dan produktif sejalan dengan perkembangan nilai-nilai budaya bangsa dalam rangka membentuk kepribadian bangsa Indonesia.

2.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2014 pemerintah Provinsi Maluku tetap memprioritaskan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hal ini tercermin dari partisipasi perempuan dalam aktivitas pembangunan maupun politik di daerah yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu, pembangunan daerah selanjutnya memberikan akses yang memadai serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan strategi pengarusutamaan gender di setiap bidang pembangunan.

2.9. Bidang Wilayah dan Tata Ruang

Pembangunan Tata Ruang Wilayah Maluku berbasis Gugus Pulau, Laut Pulau dan Pintu Jamak ditujukan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan antar gugus pulau yang ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh gugus, dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap gugus pulau, dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.

Rencana Pembangunan Tata Ruang Wilayah Maluku berbasis Gugus Pulau, Laut Pulau dan Pintu Jamak digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang.

Pembangunan Tata Ruang Wilayah Maluku pada tahun 2014 dilakukan melalui : (1) pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing gugus pulau dan produk unggulan gugus pulau, sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan gugus pulau; (2) peningkatan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal gugus pulau agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan gugus pulau lainnya; (3) pengembangan wilayah-wilayah perbatasan pada gugus pulau IX, X, XI dan XII, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga; (4) peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan; serta (5) keserasian pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta penatagunaan tanah.

Dalam rangka pembangunan di Bidang Penataan Ruang, maka pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah kegiatan pada tahun 2014 antara lain : Sosialisasi Revisi Perda RTRW Provinsi dan Fasilitasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang (Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang), Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Makariki dan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

2.10. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan 3 (tiga) ketentuan penting, yaitu pertama, pemerintah berkewajiban memenuhi ketentuan Pasal 27 (1) , yaitu dengan telah dikeluarkannya PP Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Kedua, kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 (2) Pemerintah Daerah wajib mengatur tata cara penyusunan RPJP

Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD. Dan ketiga, pemerintah berkewajiban memenuhi Pasal 30 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas. Pendekatan perencanaan dengan partisipasi masyarakat dan keterlibatan stakeholders dilakukan untuk menjaring dan menyerap melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, FGD, Pengkajian Lapangan, Monitoring, serta penyediaan data/informasi statistik pembangunan daerah.

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

- Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan daerah lain dan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi.
- Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi dan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.

Terkait dengan itu, maka sejumlah kegiatan prioritas pada bidang urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2014 meliputi : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan informasi Pembangunan (RKPD, KUA dan PPAS, Profil tenaga kerja, Indikator Sosial, IPM); Musrenbang RKPD; Peningkatan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Kawasan Timur Indonesia, UNICEF, UNDP JICA dan ILO; Koordinasi perencanaan pembangunan dan pengembangan komoditas unggulan daerah; Pengembangan sistem informasi perencanaan; monitoring dan evaluasi kinerja, serta peningkatan kemampuan teknis aparatur perencanaan.

2.11. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mencakup pembangunan sistem yang mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu menyediakan iklim yang mendorong inovasi dalam satu Sistem Inovasi Daerah serta pembangunan untuk meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnasiptek), memberikan landasan hukum bagi pengaturan pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur

penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuan. Selanjutnya unsur dalam Sistem Inovasi Daerah terdiri atas unsur kelembagaan, unsur sumber daya, dan unsur jaringan iptek.

Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) terdiri atas Perguruan Tinggi dan berbagai lembaga penelitian Pemerintah Daerah, maupun lembaga penelitian Pemerintah yang ada di daerah yang berfungsi untuk : (1) mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, inovasi dan difusi teknologi di Provinsi Maluku; dan (2) membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, memanfaatkan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumberdaya Iptek terdiri atas keahlian, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana iptek. Setiap unsur kelembagaan iptek bertanggungjawab meningkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai guna sumberdayanya. Selanjutnya, Jaringan Iptek berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan iptek untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri. Jaringan terbentuk oleh adanya kemitraan antar unsur kelembagaan, berdasarkan adanya saling kepentingan karena unsur yang satu dapat mengisi, melengkapi, dan memperkuat unsur yang lain.

Dalam rangka mengoptimalkan Jaringan Iptek maka Pemerintah Daerah pada tahun 2010 telah membentuk Dewan Riset Daerah, yang keanggotannya terdiri dari pakar berbagai bidang baik dari Litbang Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, maupun dari lembaga Litbang Pemerintah Daerah dan Litbang Pemerintah Pusat yang ada di Maluku.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memperlihatkan bahwa sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi masih terbatas, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana teknologi pun masih belum tercukupi.

2.12. Bidang Politik

Dalam upaya memperkuat keberhasilan yang telah diraih di bidang Politik, maka beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain : koordinasi forum-forum diskusi politik, Pergantian antar waktu Anggota DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota; serta Penelitian pemberkasan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada parpol tingkat provinsi.

2.13. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Kehidupan social masyarakat yang majemuk di Provinsi Maluku baik dari aspek agama, budaya, ekonomi dan social politik dapat menjadi factor pemersatu sekaligus sebagai factor pemicu konflik social dan tidak jarang menjadi konflik horizontal dan

vertical. Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan yang penting dan strategis yang berpengaruh dalam menjamin tertib dan lancar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2014 pemerintah daerah provinsi Maluku selalu konsen untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk menciptakan stabilitas keamanan di Maluku.

Pada Tahun 2014 Pemerintah Daerah Maluku memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk selalu memperbaiki permasalahan keamanan dan ketertiban secara terus menerus dan tuntas dengan melibatkan semua pihak termasuk TNI dan POLRI. Permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang masih sering terjadi di beberapa daerah seperti : 1) Sifat organisasi dari berbagai masyarakat; 2) Batas wilayah yang tidak jelas antara satu negeri dengan negeri yang lainnya; 3) Pengaruh penyalahgunaan narkoba dan minuman keras dan 4) Perkelahian yang sering terjadi antar desa.

Melalui koordinasi yang intensif terkait dengan penanganan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat (KANTRAMTIBMAS), maka gejala gangguan KANTRAMTIBMAS dapat teridentifikasi lebih awal sehingga langkah-langkah pengendalian dapat ditempuh guna menjamin stabilitas sosial dan keamanan serta berbagai aktivitas pembangunan semakin lancar, antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan TNI dan Polri, dalam upaya melakukan pengamanan pada titik-titik lokasi yang rawan serta mengisolasi daerah perbatasan konflik agar tidak terjadi konflik.
- 2) Rapat Koordinasi komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi dan kabupaten/kota se Maluku untuk mengkoordinasikan informasi-informasi yang berkembang di masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerawanan yang berakibat terjadinya bentrokan antar warga masyarakat.
- 3) Rapat Komunikasi Pimpinan Daerah bersama Bupati/Walikota se Maluku, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota se Maluku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan para latupati untuk menetapkan kebijakan dan solusi alternative guna meminimalisir konflik.

Terkait dengan upaya mewujudkan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif maka sejumlah kegiatan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Maluku pada tahun 2014 antara lain meliputi : 1) Pemantauan masalah pengungsi pasca konflik antar warga di daerah; 2) Pembinaan masyarakat pada daerah konflik; 3) Pengendalian keamanan dalam negeri .

Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang Keamanan dan Ketertiban dari tahun ke tahun memperlihatkan kondisi kehidupan dan ketertiban masyarakat yang relatif aman, terkendali, meskipun ada terjadi gangguan kamtibmas didalam masyarakat namun skalanya kecil dan dapat dikendalikan.

2.14. Bidang Hukum dan Aparatur

Penegakan hukum terhadap berbagai kasus penyalagunaan wewenang baik yang masih dalam proses pemeriksaan oleh instansi pengawasan yang berwenang maupun yang telah dilimpahkan ke pengadilan cukup mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Sementara itu, Pemerintahan Daerah Maluku telah mendorong berbagai upaya untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dan khususnya kasus korupsi antara lain dengan mengefektifkan pengawasan intern di lingkungan masing-masing, antara lain melalui :

- 1) Penetapan Peraturan Gubernur nomor 02 tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dan Keputusan Gubernur Maluku No: 301.a Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
- 2) Pembentukan satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern di seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dan menyelenggarakan pelatihan terhadap implementasi sistem pengendalian intern kepada para pejabat di seluruh SKPD.
- 3) Penandatanganan fakta integritas antara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan pemerintah daerah kabupaten/kota se Maluku, dan antara Gubernur Maluku dengan pimpinan SKPD lingkup pemerintah daerah Maluku.

Berbagai kebijakan lainnya yang dilaksanakan di bidang Hukum diarahkan pada penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang – undangan, penanganan kasus pengaduan, legislasi rancangan peraturan perundang – undangan, publikasi peraturan perundang – undangan, kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, penyuluhan hukum pertanahan; pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat, Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan; pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis di Bidang Hukum dan HAM.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menjadi fondasi penting di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan tersebut ditentukan antara lain oleh kemampuan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hubungan yang sinergis di antara keduanya, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antardaerah yang konstruktif. Untuk itu, pemantapan dan peningkatan dukungan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku tetap menjadi prioritas pada APBD tahun 2013.

Pemerintah Daerah terus mendorong peningkatan profesionalitas birokrasi daerah, melalui jalur pendidikan formal, jabatan serta pendidikan teknis substantif. Penajaman kompetensi aparatur ditempuh pula melalui mutasi jabatan, *assessment* pegawai, psikotest serta *fit and proper test*.

Kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Maluku juga didukung oleh terciptanya hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antar daerah yang konstruktif, melalui berbagai forum, antara lain meliputi : Musyawarah Pimpinan Daerah, Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi, Koordinasi teknis, Koordinasi pemungutan pajak pusat yang ada di daerah, Bantuan keuangan, dan kegiatan lain-lain. Terkait dengan itu, Kebijakan pemerintah daerah Provinsi Maluku pada tahun 2013 terutama diarahkan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten / kota. Demikian pula, koordinasi dan keterpaduan pengawasan antar semua komponen pengawasan akan terus ditingkatkan demi tercapainya tujuan pembangunan, baik melalui pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Implementasi otonomi daerah selain telah mendekatkan pemerintah setempat dengan masyarakat, juga mendorong bangkitnya partisipasi warga. Namun demikian, disamping dampak positif, otonomi daerah juga telah menimbulkan dampak negatif, seperti sengketa batas wilayah, yang berpotensi untuk memecah belah masyarakat. Untuk itu, Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2013 telah diarahkan untuk mendorong penguatan daerah otonomi baru, memfasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang Hukum dan Aparatur cukup baik, dengan memperlihatkan adanya peningkatan terhadap penanganan kasus-kasus yang merugikan negara, dan mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia, serta penyalagunaan narkoba maupun tindakan kriminal. Untuk itu peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur pada semua jenjang terus didorong guna memberikan pelayanan yang optimal kepada publik.

2.15. Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.15.1. Sumberdaya Laut

Perairan laut Provinsi Maluku memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya ikan dan non ikan yang potensial untuk dikembangkan sebagai penghasil devisa, seperti jenis ikan pelagis besar (tuna, cakalang, tongkol, tenggiri), jenis-jenis marlin, cucut, serta ikan dasar dan ikan karang. Potensi perikanan yang terbesar terdapat di Laut Arafura dengan sediaan potensi sebanyak 792.100 ton dan potensi lestari sebanyak 633.600 ton per tahun, Laut Banda dengan sediaan potensi sebanyak 248.400 ton dan potensi lestari sebanyak 198.000 ton per tahun, serta

Laut Maluku dan sekitarnya dengan sediaan potensi sebanyak 587.000 ton per tahun dan potensi lestari sebanyak 469.000 ton per tahun.

Pada kawasan laut terbatas, terdapat penyebaran ikan-ikan pelagis kecil yang menjadi tumpuan ekonomi perikanan rakyat. Selain itu, tersedia juga aneka jenis komoditas sea foods seperti rumput laut, cumi, teripang, mutiara, udang, dan sebagainya. Potensi perikanan lainnya yang terdapat pada perairan Maluku adalah ikan hias yang memiliki sediaan potensi sebesar 505.700 ton dengan potensi lestari sebesar 404.600. Provinsi Maluku juga memiliki potensi perikanan budidaya yang besar. Luas kawasan sentra produksi untuk pengembangan budidaya laut yang terdiri dari Mutiara 924 Ha, Lola 1.000 Ha, Teripang 3.100 Ha, Rumput Laut 2.500 Ha dan ikan 2.950 Ha namun potensi ini belum banyak yang dimanfaatkan.

Berdasarkan tabel 2.32 berikut diketahui bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 produksi budidaya perikanan terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2010 produksi budidaya perikanan sebesar 379.968,9 ton meningkat menjadi 512.490,98 ton pada tahun 2014. Seiring dengan peningkatan produksi budidaya tersebut, terjadi pula kenaikan nilai produksi, yakni dari 788.585 milyar rupiah pada tahun 2010 meningkat menjadi 1.328.047 triliun rupiah pada tahun 2014.

Didasarkan pada jenis ikan produksi laut, ikan tambak dan kolam Juga mengalami peningkatan. Produksi ikan laut pada tahun 2010 sebesar 379.532,4 ton meningkat menjadi 507.089,09 Ton pada tahun 2014, ikan tambak sebesar 391,4 ton meningkat pada tahun 2010 menjadi 5.322,49 ton pada tahun 2014. Untuk ikan kolam pada tahun 2010 sebesar 45,1 ton meningkat menjadi 79,40 ton tahun 2014.

Tabel 2.32.
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Hasil Budidaya Tambak, Kolam dan Laut Menurut Jenis Ikan, 2010 – 2014

Jenis Ikan	Produksi (Ton)					Nilai (Rp.Juta)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
I. Tambak	391,4	338,8	380,16	4.264,	5.322,4	76	15.355	384,76	223.29	516.1
- Bande	3,2	0,3	1,40	54	9	16	1	6,40	5	35
ng	-	-	-	1,06	12,11	-	-	-	14.500	484,4
- Mujair	388,2	338,5	2.378,	0,93	1,80	60	15,354	378,56	33.600	54
- Lain-lain			76	4.262,	5.208,5				175.19	515.5
				55	1				5	97
II. Kolam	45,1	27,5	73,37	1.638,	79,40	323	1,320	553,27	44.967	3.774
- Mas	15,2	15,9	24,76	45	25,73	120	776	27,01	806,3	1.286
- Mujair	9,6	5,9	-	26,22	5,81	81	88		33.631	145
- Lain-lain	20,3	5,7	52,26	1.349,	47,86	122	456	51,26	10.530	2.343
				83						
				307,4						
III. Laut	379.5	620.1	475.00	586.0	507.08	788.1	1.100.7	475,00	2.926.2	808.1
	32,4	09,4	0,45	89,38	9,09	86	67		38	39
Jumlah	379.9	620.4	475.45	592.0	512.49	788.5	1.117,4	938,03	3.194.5	1.328.
	68,9	75,7	3,98	07,37	0,98	85			00	047

Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Maluku, 2015

Dibandingkan dengan produksi hasil tangkapan, terbukti bahwa produksi budidaya di Provinsi masih relatif rendah. Sebagaimana disajikan dalam tabel 2.33 berikut diketahui bahwa produksi perikanan tangkap di Provinsi Maluku mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecendrungan relative mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2012 produksi perikanan provinsi Maluku sebesar **1.391.286,2** ton turun menjadi **1.166.776** ton pada tahun 2014. Meskipun produksi perikanan tangkap mengalami penurunan secara keseluruhan nilai produksi perikanan mengalami peningkatan yakni 4,086 trilyun rupiah pada tahun 2012 naik menjadi 12,055 trilyun rupiah pada tahun 2014. Hal ini terlihat dari dua komoditi yang mengalami penurunan produksi namun nilai produksi meningkat yakni udang dan cakalang, ini berarti terjadi kenaikan harga pasar yang mengakibatkan nilai produksi meningkat.

Tabel 2.33
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Provinsi Maluku
Menurut Jenis Ikan, 2012 - 2014

Jenis Ikan	Produksi (Ton)			Nilai (000 Rp)		
	2012	2013	2014	2012	2013*)	2014
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Udang	8.019,4	6.211,7	6.335,9	194.961.901	271.522.993	276.953.453
2. Cakalang	53.010,2	51.237,4	52.262,1	261.625.820	268.664.810	274.038.106
3. Kembung	28.852,7	41.634,1	42.466,8	136.580.682	343.381.962	350.249.601
4. Julung	6.298,6	7.305,9	7.452,0	12.729.276	14.691.020	14.984.840
5. Teri	9.702,6	8.316,3	8.482,6	18.571.312	22.035.202	22.475.906
6. Layang	36.903,7	34.955,1	35.654,2	113.534.171	134.330.878	137.017.496
7. Selar	14.498,9	11.577,6	11.809,2	48.516.358	41.583.302	42.414.968
8. Lain-lain	349.670,4	355.841,8	362.958,6	1.611.392.057	7.262.987.459	7.408.247.208
9. Ikan Darat	477.510,5	592.085,3	603.927,0	1.278.820.733	3.208.901.507	3.273.079.537
10. Tuna	34.454,3	34.732,9	35.427,6	244.716.516	250.718.275	255.732.641
Jumlah	1.391.286,2	534.517,8	1.166.776,00	4.086.066.919	2.651.868.855	12.055.193.756

Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Maluku, 2014

Ket *) Angka Sementara

Sebagaimana disajikan pada tabel 2.34 berikut, diketahui bahwa ekspor perikanan di Provinsi Maluku mencapai 74.354,32 ton pada tahun 2012, meningkat menjadi 197.228 ton pada tahun 2013.Sedangkan Volume ekspordengan nilai masing-masing sebesar 157.165,98 ribu US\$ pada tahun 2012 dan mencapai 268.799.483,83 ribu US\$ pada tahun 2013.

Tabel 2.34
Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Di Provinsi Maluku
Menurut Jenis Ikan 2012 - 2013

Jenis Ikan	Banyaknya (Ton)		Nilai (Us \$ 000)	
	2012	2013	2012	2013
(1)	(3)	(4)	(6)	(7)
1. Udang	2.880,95	2.011.164,60	109.440,24	183.225.883,66
2. Ikan Selar	1.964,23	906.410,20	4.113,24	8.382.609,80
3. Cumi-Cumi	-	-	-	-
4. Taripang	-	-	-	-
5. Ekor Hiu	-	-	-	-

6. Ikan Kayu	-	-	-	-
7. Ikan Kerapu Hidup	-	-	-	-
8. Mutiara Bundar	-	-	-	-
	69.509,14	194.310.616,54	43.612,50	77.190.990,38
9. Ikan Campuran				
10. Ikan Hias				
11. Lain – Lain				
	74.354,32	197.228.191,34	157.165,98	268.799.483,83

Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Maluku, 2014

Luas kawasan hutan di Provinsi Maluku berdasarkan hasil perhitungan Planimetris adalah seluas 4.396.640 hektar, yang terdiri dari hutan konservasi 405.745 hektar, hutan lindung 618.744 hektar, hutan produksi terbatas 926.533 hektar, hutan produksi tetap 667.513 hektar dan hutan produksi yang dapat dikonversi 1.772.105 hektar. Rincian kawasan hutan menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku diperlihatkan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Rincian Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Luas Fungsi Kawasan Hutan (Ha)					Jumlah	%
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kota Ambon	-	9.597	-	-	-	9.597	0,24
2	Maluku Tengah	175.743	134.367	179.947	28.522	100.614	619.192	15,80
3	Buru	6.849	108.169	109.960	106.835	95.621	427.434	10,90
4	Buru Selatan	-	73.260	101.497	90.799	79.588	345.143	8,81
5	Maluku Tenggara	18.017	6.439	2.399	2.966	17.323	47.144	1,20
6	Maluku Tenggara Barat	77.197	13.012	78.167	112.385	138.799	419.559	10,70
7	Maluku Barat Daya	51.168	34.774	4.584	71.262	173.021	334.808	8,54
8	Seram Bagian Barat	32.251	124.493	156.087	9.810	91.808	414.449	10,57
9	Seram Bagian Timur	1.216	107.880	260.525	24.757	118.269	512.646	13,08
10	Kepulauan Aru	67.103	6.254	-	194.269	510.261	777.887	19,85
11	Tual	-	9.257	987	-	1.596	11.840	0,30
	Jumlah	429.543	627.503	894.153	641.603	1.326.899	3.919.701	100

Sumber : SK.Menteri Kehutanan Nomor : 871/Menhut-II/2013, tanggal 6 Desember 2013

Produksi hasil hutan di Provinsi Maluku selama periode 2010-2014 sebagaimana disajikan dalam tabel 1.30 berikut, menunjukkan bahwa hasil utama produksi Hutan di Maluku adalah kayu bulat. Volume produksi kayu bulat di Provinsi Maluku pada tahun 2010 mencapai 212.346,88m³, dan meningkat menjadi 259.649,64 m³ pada tahun 2014. Selain produksi kayu, hutan di Maluku juga menghasilkan berbagai komoditi lain seperti damar kopal, minyak kayu putih, rotan,

arang kayu, gaharu, bambu, tepung sagu, kemedangan, minyak lawang, dan arang serbuk. Dari hasil hutan non kayu tersebut, produksi Damar, Minyak kayu putih dan Rotan relatif menonjol dibandingkan dengan komoditi non kayu lainnya.

Tabel 2.36.
Realisasi Hasil Produksi Hasil Hutan di Provinsi Maluku, 2010-2014

NO	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)
1	Kayu Bulat					
	a. Produksi (M ³)	212.346,88	297.492,67	231.668,33	268.536,29	259.649,64
	b. Ekspor (Ribuan US\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kayu Olahan					
	a. Produksi (M ³)	0,00	0,00	19.395,2590	3.297,3533	10.987,28
	b. Ekspor (Ribuan US\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Non Kayu					
	a. Produksi					
	- Minyak Kayu putih (Liter)	40.015,00	500,00	1.525	0,00	21.725
	- Daun Kayu putih (Ton)	13.045,00		280	440	360
	- Damar Kopal (Ton)	256,00	4.200	287	211.	83
	- Rotan (Ton)	140,00	0,00	35	0,00.	0,00
	- Gaharu (Kg)	0,00	0,00	-	0,00	6,200
	- Kemedangan (Kg)	0,00	0,00	32.300	77,595	40,02

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, 2015

2.15.2. Energi dan Sumberdaya Mineral

Maluku ditinjau dari aspek geologi berada pada pertemuan 3-4 lempeng utara kerak bumi, yaitu Lempeng Hindia-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Fasifik. Posisi Maluku ini sangat menguntungkan karena proses geologi menghasilkan mineralisasi berupa bahan galian (tambang) dan energi yang ekonomis dan dapat menjadi sumber devisa daerah dan negara bila dikembangkan.

Di Kabupaten Buru Selatan terdapat potensi tambang bahan galian antara lain: (1) Batu Gamping di Wae Sua, Sungai Nalbesy, Gunung Nalbesy, Gunung Leksula, Tanjung Kobat Ha dan Desa Tifu Kecamatan Leksula, serta Desa Fatmite, Desa Lektama dan Desa Elfule Kecamatan Namrole; (2) Kuarsa di Desa Seith (Tanjung Kayu Putih) Kecamatan Buru Utara; (3) Mangan di utara Kapung Waturen (Tanjung Fatulat), (4) Bahan Andesit yang berasal dari lava terdapat di Pulau Ambelau dengan cadangan yang cukup besar.

Di Kabupaten Buru terdapat potensi energi terbarukan tenaga air juga ditemukan di Wai Nibe dan Wai Geren yang dapat dikembangkan untuk PLTA. Potensi Panas Bumi juga ditemukan di Kabupaten Buru yaitu di Waeapo dan Batabual yang dapat dikembangkan untuk pembangkit listrik, serta pada tahun 2011 telah dijumpai emas.

Di daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, terdapat potensi sumberdaya mineral dan energi, antara lain : (1) Batu gamping untuk bahan industri semen dan bahan bangunan di Pulau Kasuari Kecamatan Waisala; (2) Marmer di Gunung Nakaela dan Gunung Kasie Kecamatan Taniwel; Desa Morokao dan Lumoli Kecamatan Seram Barat, Gunung Anuena dan Gunung Keki Kecamatan Huamual Belakang; (3) Mika di Desa Buria Kecamatan Taniwel; (4) Nikel di Desa Supe, Desa Kaibobu, semenanjung Huamual, Gunung Tinggi Kecamatan Seram Barat dan Pulau Kelang; (5) Bahan bangunan dan filit terdapat dalam jumlah cukup besar di daratan Seram Barat; dan (6) Kerikil, kerakal dan pasir terdapat di daerah Kairatu, Kamarian, dan Seram Barat.

Potensi sumberdaya lainnya yang ditemukan di daerah ini adalah potensi air untuk pembangkit listrik seperti sungai Mala-1, Mala-2 Liocopa, Rivapa-2, Nala, Kawanenu dan Aru di Kecamatan Kairatu; Sungai Kukureha dan Eti di Kecamatan Seram Barat.

Di Kabupaten Maluku Tengah, terdapat potensi mineral berupa : (1) Batu gamping di Desa Yaputih Kecamatan Tehoru; (2) Kuarsa di Desa Ruta Kecamatan Amahai, Tanjung Boi dan Pantai Waisisi Kecamatan Saparua, Desa Haruku dan Oma Kecamatan Pulau Haruku; (3) Granit di Desa Hatu Kecamatan Leihitu; (4) Lempung di Desa Ouw Kecamatan Saparua, Desa Titatawai Kecamatan Nusalaut, Desa Laimu dan Yaputi Kecamatan Tehoru dan Desa Hitu Kecamatan Leihitu; (5) Marmer di Desa Saleman Kecamatan Seram Utara; (6) Mika di Desa Karlutu Warasiwa Kecamatan Seram Utara; dan (7) Tembaga di desa Desa Oma, Haruku dan Aboru Kecamatan Pulau Haruku; (8) Belerang di Desa TNS.

Potensi panas bumi di Kabupaten Maluku Tengah yang potensial untuk pembangkit listrik yaitu di Desa Alang dan Larike Kecamatan Leihitu Barat, Desa Tulehu/Desa Suli Kecamatan Salahutu (sementara dieksplorasi untuk pembangkit tenaga listrik), Desa Oma Kecamatan Pulau Haruku, Desa Tiouw Kecamatan Saparua, Desa Nalahia dan Desa Sila Kecamatan Nusalaut.

Potensi sumberdaya energi lainnya yang ditemukan di daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah potensi air untuk pembangkit listrik seperti Wae Isal di Kecamatan Seram Utara; Wae Teon, Wae Lasa, Wae Kawa, Sungai Walala, Sungai Nasulu dan Sungai Jahe di Kecamatan Tehoru; serta Wae Mala, Wae Pia dan Sungai Nua di Kecamatan Amahai, serta minyak dan gas yang sementara dieksplorasi di Seram Utara oleh CITIC LTD.

Di Kabupaten Seram Bagian Timur, terdapat sumberdaya mineral berupa: (1) Batu gamping di Desa Selangor Air dan Desa Urung Kecamatan Seram Timur dan (2) Marmer di Desa Gusa Laut Kecamatan Werinama. Sumberdaya energi yang penting di daerah ini adalah minyak bumi di Kecamatan Bula. Produksi minyak di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2009 sebesar 1.326.575 barel.

Di Kota Ambon, terdapat sumberdaya mineral berupa : (1) Asbes di Desa Hukurila Kecamatan Sirimau; (2) Batu gamping di Desa Batu Merah, Desa Halong dan Desa Latuhalat; (3) Kuarsa di Desa Hukurila Kecamatan Sirimau; (4) Granit di

Desa Seri Kecamatan Nusaniwe; (5) Lempung di Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe; (6) Indikasi Nikel di Desa Hukurila, Desa Ema, dan Gunung Nona Kecamatan Sirimau. Di Kota Ambon juga terdapat potensi Panas Bumi Desa Tawiri yang dapat dikembangkan untuk pembangkit listrik.

Di Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat sumberdaya mineral : (1) Barite di Lerokis, Kali Kuning, Kayu Lepa, Kelapa Tiga, Kayu Putih, Batu Kapal dan pantai Merah Kecamatan Wetar; (2) Belerang di Gunung Wurlali dan Desa Kehli Kecamatan Damar; (3) Emas di Lerokois dan Kali Kuning Kecamatan Wetar; (4) Pasir Besi di Desa Mahaleta Kecamatan Mdonu Hyera; (5) Perak di Lerokois, Kali Kuning, Kayu Lepa, Kelapa Tiga, Kayu Putih, Batu Kapal dan pantai Merah Kecamatan Wetar; dan (6) Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar. Sedangkan, potensi sumberdaya energi yang ditemukan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya adalah di Lepas Pantai Pulau Selaru dan Marsela, potensi energi gas bumi ini sementara dieksploitasi oleh Perusahaan Inpex Marsela.

Di Kabupaten Maluku Tenggara ditemukan sumberdaya mineral Batu Gamping di Pulau Kaidullah, Pulau Manir, Pulau Werbal dan Pulau Waurul. Sedangkan potensi energi di Kabupaten Maluku Tenggara adalah Minyak Bumi di Kei Blok dan Rebi Blok.

Di Kabupaten Kepulauan Aru, terdapat potensi sumberdaya energi di lepas pantai sebelah utara pulau Wokam yang sedang dieksplorasi oleh Korea national Corporation Oil dan Lepas Pantai Timur Kepulauan Aru sedang dieksplorasi oleh Conocophillips.

Minyak bumi, gas bumi dan batu bara mempunyai peranan besar sebagai sumber energi untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain sebagai pendukung pembangunan ekonomi, ketiga komoditas energi tersebut juga berperan sebagai sumber penerimaan devisa negara yang sangat penting.

Selain upaya-upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi, guna menjamin pasokan energi di dalam negeri, upaya-upaya penganeekaragaman (diversifikasi) sumber energi lainnya, selain minyak bumi, terus dilakukan. upaya-upaya dimaksud antara lain adalah pemanfaatan gas dan batubara, serta energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga surya dan angin, mikrohidro, dan sebagainya. Terkait dengan itu, di Maluku sedang dibangun pembangkit tenaga listrik energi alternatif, antara lain meliputi: (1) PLTU Wai, Tual, Namlea, Piru, dan Langgur; (2) PLTP Tulehu; (3) PLTMH Wai Mala, Makariki, Tene dan Wai Tina; (4) Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa di Kabupaten Buru Selatan; dan (5) PLTS sebesar 1.920 KWP di 11 Kabupaten/Kota.

<div>Tabel 2.37.</div> <div>Peluang Potensi Panas Bumi untuk Pembangkit Listrik di Provinsi Maluku</div>			
Kecamatan	Desa	Potensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Salahutu	Tulehu/Suli	100 MWe	Eksplorasi
P. Haruku	Oma	25 MWe	
Nusalaut	Nalahia	25 MWe	
P. Saparua	Tiouw	25 MWe	
Elpaputih	Elpaputih	25 MWe	
Leihitu Barat	Larike	25 MWe	
Waeyapo	Waeyapo	25 MWe	
Batabual	Batabual	25 MWe	
Kepala Madan	Kepala Madan	25 MW	
Baguala	Hative Besar	25 MW	
Baguala	Tawiri	25 MW	

Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku, 2014

Tabel 2.38. Peluang Potensi Sumber Air untuk Pembangkit Listrik di Maluku							
Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa	Nama Sungai	Perkiraan Daya (KW)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
Kabupaten Maluku Tengah	Amahai	Masohi	Wae Mala	2.100			
			Wae Pia	3.300			
			Nau-1	3.500			
			Nau-2	5.500			
	Seram Utara	Wahai	Wae Talla*)	Wae Talla*)			
			Isal-1	9.000			
			Isal-2**)	60.000			
			Isal*)	4.300			
	Tehoru	Tehoru	W. Teon	5100			
			W.Lasa	5.700			
			W. Kawa	12.300			
			Napusuloku	13.300			
			Jahe	4.600			
			Walala-1	3.500			
			Lau	12.400			
			Nasulu-1	5.700			
			Nasulu-2	4.000			
			Walala-2	5.400			
			Kabupaten Seram Bagian Barat	Kairatu	Kairatu	Mala-1*)	14.600
						Mala-2	7.500
Liopa	1.500						
Riapa-2	1.900						
Nala	2.800						
Kawanenu	2.400						
Piru	Piru	Aru		1.800			
		Kukureha		6.00			
		Ety		2.400			

Keterangan :*) Pengukuran AWLR/ARGR/RGR **) Selesai Feasibility Study

Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku, 2014

2.15.3. Pariwisata

Maluku yang dikenal sebagai provinsi seribu pulau memiliki sumberdaya alam yang melimpah dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik di daratan maupun di laut. Disamping sumberdaya alam yang melimpah dan beranekaragam, Maluku juga memiliki aneka ragam adat-istiadat, budaya, dan peninggalan sejarah. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang amat penting bagi pengembangan kepariwisataan. Bila potensi berupa keanekaragaman hayati, keunikan dan keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam, gejala alam yang spesifik dan peninggalan sejarah tersebut dimanfaatkan secara optimal, akan menjadi sumber penggerak utama perekonomian daerah.

Provinsi Maluku memiliki taman laut yang indah dimana hidup berbagai jenis spesies ikan yang beraneka warna, hewan laut, dan berbagai jenis mahluk karang yang dapat dinikmati dari permukaan laut. Beberapa lokasi taman laut yang terkenal di Maluku, antara lain terdapat di pulau Ambon, kepulauan Banda, pulau Nusalaut, kepulauan Kei, kepulauan Aru dan kepulauan Tanimbar, Wetar, Leti, dan Babar. Daerah Maluku juga memiliki pantai yang sangat beragam dan tidak kalah menariknya dengan keindahan kehidupan bawah lautnya.

Disamping potensi alam laut dan pantai, di Maluku juga terdapat Taman Nasional Manusela yang merupakan objek wisata alam dengan daya tarik tersendiri, memiliki pemandangan alam yang indah dengan topografi berbukit-bukit di antaranya tepi Markele, lembah Manusela, tepi Kobipoto, dataran Mual sebelah utara, lembah Wae Kawa disebelah selatan, dan lembah Pilianan yang kaya akan jenis kupu-kupu. Selain itu, Taman Nasional Manusela dapat dimanfaatkan sebagai sarana/tempat penelitian lapangan karena keanekaragaman flora dan fauna langka dan endemik, dan penelitian farmasi.

Kekayaan lain Maluku adalah gua alam, diantaranya Gua Akohi yang memiliki stalagtit dan stalagmit yang indah di desa Tamilouw (40 km sebelah timur Masohi) pulau Seram. Selain itu gua Akohi juga memiliki aneka dekorasi gua/ speleotam seperti jarum gepsim, bibir gepsim, rambut bidadari, batu air, payung kalsit, tirai kalsit, dan lainnya. Di desa Saleman, Seram Utara terdapat pula gua Lusiala.

Maluku yang terletak pada pertemuan busur vulkanik Pasifik dari arah utara dan Hindia Australia dari arah selatan, menyebabkan terjadinya berbagai aktifitas geologi diantaranya adalah gunung berapi. Beberapa diantaranya masih aktif sampai saat ini. Salah satu gunung api yang masih aktif di Maluku adalah Gunung Api di Kepulauan Banda dengan ketinggian puncak sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Pada kondisi normal selalu mengundang minat pecinta alam untuk mendaki sambil menikmati keindahan alam dan pemandangan pulau-pulau di sekitarnya.

Aktifitas tektonik lainnya adalah terdapat sumber air panas pada berbagai tempat seperti di Kapala Madan, Waeapo dan Batabual (Pulau Buru); di Kabupaten Maluku Tengah meliputi Desa Alang dan Larike Kecamatan Leihitu, Desa Tulehu

Kecamatan Salahutu, Desa Oma Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Saparua, dan Kecamatan Nusalaut; serta Desa Tawiri Kota Ambon. Sumber air panas ini dapat dijadikan kolam pemandian wisatawan.

Selain potensi wisata alam, Provinsi Maluku juga memiliki potensi wisata budaya seperti pukul manyapu di Desa Mamala-Morela, maupun wisata sejarah seperti benteng, gereja dan mesjid tua, maupun goa-goa peninggalan tentara Jepang setelah perang dunia kedua. Sebagian potensi wisata ini telah dikelola dan dikembangkan pemerintah daerah untuk menjadi salah satu sektor penggerak utama perekonomian Maluku.

Berbagai kebijakan Pembangunan terus didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi pariwisata di Maluku, Pameran gebyar wisata nusantara, pengembangan dan pemeliharaan objek wisata unggulan, Pesta Teluk Ambon, Perlombaan kejuaraan poli pantai, serta Pelatihan kepada pengusaha pariwisata dan pemandu wisata.

Dampak pengembangan pemasaran, destinasi, dan jaringan kerjasama pariwisata di Maluku serta adanya beberapa even penyelenggara kegiatan nasional di Maluku tahun 2014 telah mendorong masuknya wisatawan manca negara. Sebagaimana disajikan dalam tabel 2.37 berikut diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Maluku telah meningkat dari 4.584 orang pada tahun 2010 menjadi 16.295 orang pada tahun 2014, atau dalam kurun waktu 5 tahun terjadi rata-rata kenaikan per tahun jumlah wisatawan manca negara yang ke Maluku mencapai 2.342 orang.

Wisatawan paling banyak berkunjung ke Maluku pada tahun 2014 berasal dari Kawasan Eropa sebanyak 2.529 orang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 yakni sebesar 1.997 orang. Jumlah wisatawan yang mengalami peningkatan yakni yang berasal dari asia dimana tahun 2014 terdata sebanyak 797 orang, turun dibandingkat tahun 2013 sebesar 722 orang.

Tabel 2.39
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara
di Provinsi Maluku tahun 2010-2014

NO.	KAWASAN	JUMLAH KUNJUNGAN/TAHUN (ORG)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	EROPA	5.260	4.083	2.990	1.997	2.529
2.	AMERIKA	1.173	484	547	281	600
3.	AUSTRALIA	468	451	596	231	513
4.	ASIA	1.063	754	411	722	797
5.	ASEAN	443	294	845	255	415
6.	LAINNYA	1.652	9.537	12.431	11.688	11.438
TOTAL		4.584	10.059	15.603	15.174	16.295

Sumber; DinasPariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2015

2.16. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

Evaluasi kinerja pembangunan melihat tentang pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD tahun 2014 meliputi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019. Pelaksanaan pembangunan pada berbagai bidang pembangunan adalah sebagai berikut ;

TABEL EVALUASI CAPAIN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN LALU